

1060 37000

LABEL SEMENTARA SENSUS BARANG 2014			
Ruang	ID	Lokasi	Petugas
B2102	123.0191.3547-2	GB22	KRR



KANTOR STATISTIK PROPINSI JAWA TIMUR  
 Jl. Raya Kendangsari Industri 43 – 44 Surabaya  
 Telp. 813611 - 813673 - 819343 - 813326 - 813326



VN. NR. 3500,8304.

**Produk Domestik Regional  
 Bruto  
 Propinsi Jawa Timur  
 1975 - 1980**

www.bps.go.id

KANTOR STATISTIK  PROP. JAWA TIMUR

1060 =  $\frac{2}{9}$  83

**Produk Domestik Regional  
Bruto  
Propinsi Jawa Timur  
1975 - 1980**

KANTOR STATISTIK  PROP. JAWA TIMUR

Kata Pengantar

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur 1975 — 1980 merupakan hasil penghitungan Kantor Statistik Propinsi Jawa Timur. Buku publikasi ini adalah terbitan ke dua dan juga terkandung di dalamnya perbaikan terhadap sebagian data pada hasil PDRB 1975 — 1978. Perbaikan selalu kami lakukan untuk memperoleh angka Statistik yang lebih dapat diandalkan.

Pada publikasi ini PDRB tidak saja dihitung menurut sektor-sektor yang ada tetapi telah diusahakan pula PDRB dilihat dari segi penggunaannya. Dengan demikian para konsumen dapat melihat pertumbuhan perekonomian di wilayah ini dari dua sisi. PDRB sektoral akan menggambarkan perkembangan pola atau struktur perekonomian, laju perkembangan masing-masing sektor, tingkat pertumbuhan antar sektor dan sebagainya. Apabila disajikan dari sudut penggunaan/pengeluaran akan dapat diketahui sampai seberapa jauh perbandingan penggunaan untuk konsumsi dan pembentukan modal dan arus barang baik antar daerah maupun luar negeri. Justru dari segi penggunaan inilah kita mengetahui kemajuan suatu wilayah dalam kaitannya dengan Prospek perekonomian yang akan datang.

Selain data tahun 1975 — 1980 disajikan pula hasil pengolahan PDRB tahun 1981 walaupun sifatnya masih sementara. Penghitungan PDRB 1981 tersebut dan perkiraan PDRB tahun 1982 dalam waktu singkat akan dapat disajikan.

Kepada semua pihak yang telah membantu sehingga dimungkinkannya penghitungan PDRB kami ucapkan terima kasih. Untuk penyempurnaan penghitungan dan publikasi berikutnya, kami harapkan kritik dan saran para pemakai data.

Demikian semoga publikasi ini bermanfaat sebagai salah satu bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan di wilayah Jawa Timur khususnya dan Nasional pada umumnya.

Surabaya, 1 Juni 1983

KANTOR STATISTIK PROPINSI

J A W A T I M U R

KEPALA,



---

SUTOPO MARTOWARDOYO, M.Sc.

NIP. 340000541

DAFTAR — ISI

	Halaman.
Kata Pengantar :	i
Daftar Isi :	iii
Daftar Tabel :	iv
BAB I :	1
II :	1
III :	7
IV :	13
4.1 Nilai Absolut PDRB	13
4.2 Distribusi sektoral	15
4.3 Indeks Harga Implisit	19
4.4 Pertumbuhan dan laju pertumbuhan	29
4.5 PDRB dan pendapatan per kapita	32
V :	40
5.1 Komposisi PDRB	40
5.2 Distribusi Penggunaan	41
5.3 Indeks Harga Implisit	45
5.4 Perkembangan dan pertumbuhan	49
VI :	51
6.1 Tabel — tabel pokok sektoral	53
6.2 Tabel — tabel menurut penggunaan	67
6.3 Tabel — tabel perbandingan antar Propinsi	75

DAFTAR — TABEL

	Halaman
TABEL 6.1.1 : Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur atas Dasar Harga Berlaku Th 1975 — 1981.	55
TABEL 6.1.2. : Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur atas Dasar Harga Konstan 1975 Th 1975 — 1981.	56
TABEL 6.1.3 : Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku	57
TABEL 6.1.4 : Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 1975.	58
TABEL 6.1.6 : Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 1975	60
TABEL 6.1.7 : Pendapatan Regional dan Angka-Angka Per Kapita Propinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku.	61
TABEL 6.1.8. : Pendapatan Regional dan Angka-Angka Per Kapita Propinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 1975.	62
TABEL 6.1.9 : Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku.	63
TABEL 6.1.10 : Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 1975.	64
TABEL 6.1.11 : Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 1975.	65
TABEL 6.2.1. : Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur menurut Penggunaan atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 1975.	69
TABEL 6.2.2 : Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 1975.	70
TABEL 6.2.3 : Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 1975.	71
TABEL 6.2.4 : Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur Menurut Penggunaan Atas Dasar	

	Harga Berlaku dan Konstan 1975.	72
TABEL 6.2.5	: Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 1975,	73
TABEL 6.3.1	: Perbandingan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi-Propinsi Di Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku	77
TABEL 6.3.2	: Perbandingan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi-Propinsi di Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 1975	78
TABEL 6.3.3	: Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi-Propinsi di Indonesia atas Dasar Harga Konstan 1975	79
TABEL 6.3.4	: Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi-Propinsi di Indonesia atas Dasar Harga Konstan 1975.	80
TABEL 6.3.5	: Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Propinsi-Propinsi di Indonesia atas Dasar Harga Berlaku	81
TABEL 6.3.6	: Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Propinsi-Propinsi di Indonesia atas Dasar Harga Konstan 1975.	82
TABEL 6.3.7	: Perbandingan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Propinsi-Propinsi di Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku.	83
TABEL 6.3.8	: Perbandingan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Propinsi-Propinsi di Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 1975.	84
TABEL 6.3.9	: Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Propinsi-Propinsi di Indonesia.	85
TABEL 6.3.10	: Rata-rata tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi-Propinsi di Indonesia Dasar Harga Konstan 1975.	86

## BAB I. PENDAHULUAN.

Tujuan Pembangunan Nasional didalam GBHN adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spirituil berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. —

Tujuan ini tidak mungkin akan dapat terwujud dalam beberapa tahun saja dan bahkan kurun waktu tertentu untuk mencapainya. Oleh karena itu Pemerintah menetapkan arah dan kebijaksanaan pembangunan serta sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Pola umum jangka panjang ini pelaksanaannya diatur secara bertahap yang merupakan Pelita-pelita yang berkesinambungan.

Berbagai upaya baik Pemerintah maupun masyarakat diseluruh pelosok Propinsi Jawa Timur telah di tempuh untuk mensukseskan Pembangunan daerah yang merupakan bagian pembangunan nasional demi tercapainya tujuan pembangunan seperti tertera pada GBHN.

Hasil - hasil pembangunan daerah perlu dikaji dan dievaluasi secara mendalam agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah digariskan. Salah satu alat yang dapat dipergunakan untuk analisa dan perencanaan dalam pembangunan yaitu penyajian Produk Domestik Regional Bruto Propinsi (PDRB). Publikasi PDRB Jawa Timur ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan penafsiran lebih terperinci mengenai pendapatan regional Jawa Timur.

## BAB II KONSEP YANG DIPAKAI DAN PERMASALAHANNYA.

### 1. Umum :

Konsep yang dipakai untuk pendapatan masyarakat ini, masih dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah seluruh nilai tambah (Produk) yang ditimbulkan oleh berbagai sektor/lapangan usaha, yang melakukan kegiatannya di suatu daerah (region) tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksi. Jadi PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut, oleh karenanya merupakan gambaran "Production Originated".

Beberapa konsep dan definisi yang penting untuk diketahui didalam penghitungan Pendapatan Regional adalah :

#### a. Produk Domestik Regional Bruto ( Gross Domestic Regional Product )

Ada tiga konsep mengenai hal ini bila ditinjau dari segi yang berlainan :

##### (i) Dari segi Produksi.

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi didalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu ( biasanya satu tahun ).

(ii) Dari Segi Pendapatan.

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh Faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu ( biasanya satu tahun ).

(iii) Dari segi pengeluaran.

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga sosial swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto perubahan stok dan ekspor neto, didalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu ( biasanya satu tahun ).

- b. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku ( Gross Domestic Regional Product at current market prices ) adalah jumlah nilai produk atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.
- c. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan suatu tahun ( Gross Domestic Regional product at constant market prices ) adalah jumlah nilai produk atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap suatu tahun.
- d. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar ( Gross Domestic Regional Product at market prices ) merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari lapangan usaha, meliputi balas jasa faktor produksi ( upah dan gaji, surplus usaha ) dan pajak tak langsung neto.
- e. Produk Regional Bruto ( Gross Regional Product ) adalah produk domestik Bruto ditambah dengan pendapatan neto dari luar daerah ( region ).
- f. Produk Regional neto ( net Regional product ) adalah produk regional Bruto dikurangi dengan penyusutan barang-barang modal.
- g. Produk Regional neto atas dasar harga biaya faktor produksi ( Net Regional Product at factor cost ) adalah produk Regional neto atas dasar harga pasar dikurangi pajak tak langsung neto. Produk Regional neto atas dasar biaya faktor produksi merupakan pendapatan Regional.
- h. Pendapatan per kapita ( per capita income ) adalah produk Regional neto atas dasar biaya faktor produksi dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
- i. Pajak tak langsung neto ( Net indirect taxes ) adalah pajak tak langsung dikurangi dengan subsidi yang diberikan pemerintah kepada Produsen.
- j. Angka indeks implisit adalah angka indeks yang diperoleh sebagai hasil bagi antara nilai atas dasar harga yang berlaku dengan nilai atas dasar harga konstan, angka ini menunjukkan indeks harga secara menyeluruh.



## 2. PDRB menurut penggunaan :

Pendekatan dari segi pengeluaran bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi didalam negeri. Jadi kalau dilihat dari segi penggunaan maka total supply dari barang dan jasa itu digunakan untuk :

- (a). Konsumsi rumah tangga.
- (b). Konsumsi Lembaga Swasta yang tidak mencari untung.
- (c). Konsumsi Pemerintah.
- (d). Pembentukan modal tetap Bruto.
- (e). Perubahan stock, dan
- (f). Ekspor Neto.

Dipakainya istilah ekspor neto disini adalah karena yang akan dihitung hanya nilai barang dan jasa yang berasal dari produksi dalam daerah (region) saja, maka dari jumlah penyediaan diatas perlu dikeluarkan kembali nilai impornya baik dari luar daerah maupun dari luar negeri.

Secara definisi akan sulit menyusun Pendapatan Regional menurut penggunaannya karena data mengenai arus pendapatan yang keluar / masuk daerah masih sukar diperoleh.

## 3. Pendapatan orang seorang ( Personal Income ) Dan Pendapatan Yang Siap Dibelanjakan ( Disposable Income ).

Dari uraian sederhana diatas maka konsep yang dipakai dalam Regional Income dapat diurutkan sebagai berikut :

- (a). Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Pasar ( Gross Regional Domestic Product at market prices ).

minus : penyusutan akan sama dengan

- (b). Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar ( Net Regional Domestic Product at market prices )

minus : pajak tak langsung neto, akan sama dengan :

- (c). Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor ( Net Regional Domestic Product at factor cost ).

plus : pendapatan yang masuk dari luar daerah/luar negeri

minus : pendapatan yang mengalir keluar daerah/luar negeri  
akan sama dengan :

(d). Pendapatan Regional ( Regional Income )

minus : — pajak pendapatan perusahaan ( corporate income taxes )  
— keuntungan yang tidak dibagikan ( undistributed profit )  
— iuran kesejahteraan sosial ( sosial security contribution )

plus : tranfer yang diterima oleh rumah tangga dan bunga neto atas hutang pemerintah,  
akan sama dengan :

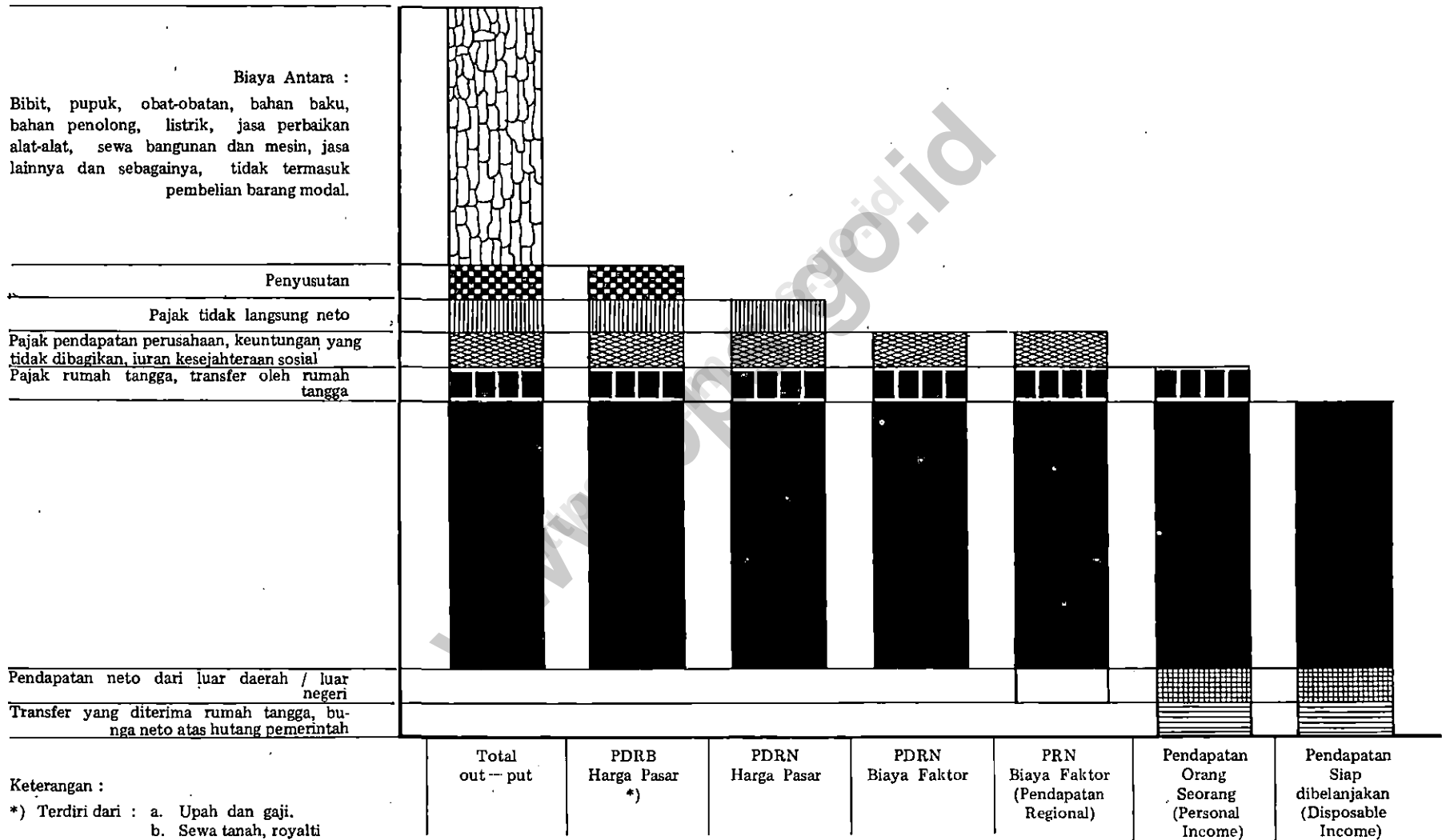
(e). Pendapatan orang seorang ( personal income ).

minus : pajak rumah tangga, tranfer yang dibayarkan rumah tangga  
akan sama dengan :

(f). Pendapatan yang siap dibelanjakan ( disposable income ).

Untuk lebih jelasnya, lihat susunan agregat Pendapatan Regional pada halaman berikut.

SUSUNAN AGREGAT PENDAPATAN REGIONAL



Keterangan :

- \*) Terdiri dari :
- a. Upah dan gaji.
  - b. Sewa tanah, royalti
  - c. Bunga modal
  - d. Keuntungan (dividen dan laba ditahan)
  - e. Penyusutan
  - f. Pajak tak langsung neto

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto  
 PDRN = Produk Domestik Regional Neto  
 PRN = Produk Regional Neto

#### 4. Permasalahan yang dihadapi :

Publikasi Pendapatan Regional ini di terbitkan belum dapat menyajikan angka-angka pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah. Hal ini disebabkan karena arus pendapatan yang mengalir antar daerah ( region ) masih sulit untuk diperhitungkan. Dalam pengertian ini, pendapatan dari faktor produksi yang berada diwilayah lain, tetapi dimiliki penduduk wilayah itu harus diperhitungkan sebagai bagian pendapatan wilayah itu, sebaliknya apabila faktor produksi yang berada di wilayah ini di miliki oleh penduduk wilayah lain harus diperhitungkan sebagai bagian pendapatan wilayah lain. Namun demikian sebagai pendekatan (proxy) terhadap konsep Pendapatan Regional yang sebenarnya, telah dihitung Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor yaitu PDRB yang dijelaskan diatas dikurangi dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto.

Dari publikasi Pendapatan Regional ini masih di jumpai beberapa kelemahan yang perlu disempurnakan lagi. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain :

- a. Beberapa data dasar yang digunakan dalam penghitungan ini masih lemah. Umumnya data tersebut merupakan angka-angka yang belum sempurna baik mutu maupun ruang lingkupnya. Banyak data tersedia, tetapi belum sesuai dengan apa yang diperlukan, sehingga untuk pelaksanaan Penghitungannya kadang-kadang perlu dilakukan secara perkiraan dan penyesuaian berdasarkan indikator-indikator yang ada.  
Data dasar yang diperlukan antara lain tentang produksi, harga, struktur biaya dan sebagainya.
- b. Data yang dipakai dalam penghitungan Pendapatan Regional tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber seperti sensus dan survei, ataupun catatan hasil aktivitas administrasi baik yang berasal dari berbagai instansi pemerintah maupun swasta, karena keaneka ragaman sumber data tersebut menyebabkan adanya angka yang kurang Konsisten antar daerah dan waktu.
- c. Kelangkaan data yang tersedia dapat mempengaruhi penggunaan konsep, definisi dan metode estimasi, sehingga di dalam usaha penyeragamannya di jumpai banyak kesulitan.

Akibat lemahnya beberapa data dasar yang dipakai baik mutu maupun ruang lingkupnya, keanekaragaman sumber data, ketergantungan penghitungan terhadap data yang tersedia serta pelaksanaan oleh berbagai instansi yang berbeda; menyebabkan angka-angka hasil akhir belumlah dapat dikatakan sempurna. Namun demikian usaha perbaikan penyempurnaan penghitungan Pendapatan Regional terus di lakukan.

Akhirnya walaupun masih terdapat beberapa kelemahan seperti disebutkan diatas, publikasi ini berguna sekali sebagai bahan studi perbandingan dan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan baik tingkat regional maupun nasional.

### BAB III. URAIAN SINGKAT ANGKA PDRB JAWA TIMUR

Pembangunan nasional pada dasarnya merupakan rangkuman dari pada berbagai pembangunan sektoral dan regional yang tersebar di seluruh wilayah nusantara.

Lingkup pembangunan menyangkut berbagai hal meliputi bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya. Sedangkan pedoman tetap berlandaskan pada trilogi pembangunan yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas. Adapun urutan dari trilogi yang diprioritaskan disesuaikan dengan kondisi dan tuntutan pembangunan itu sendiri. Untuk menjawab sampai seberapa jauh hasil-hasil pembangunan pada periode 1975 — 1980 khususnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi di wilayah Jawa Timur hasil penghitungan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur oleh Kantor Statistik Propinsi Jawa Timur dapat memberikan sumbangan ala kadarnya. Barangkali bidang ekonomi inilah yang relatif mudah untuk diamati, karena indikatornya dapat dijabarkan dalam bentuk data agregatif.

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) ini sebagai indikator ekonomi makro diharapkan mampu memberikan petunjuk bagaimana situasi perkembangan ekonomi di daerah Jawa Timur selama 5 (lima) tahun terakhir. Usaha penyajian data dan tabel-tabel PDRB yang teliti sangat membantu untuk menyusun suatu analisa tentang keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Perubahan-perubahan yang terjadi baik menyangkut produksi sektoral, perkembangan tahunan, penggeseran-penggeseran peranan berbagai sektor lapangan usaha dan sebagainya baik dinilai menurut harga berlaku maupun harga konstan akan dapat menunjukkan kemajuan pembangunan ekonomi yang dicapai. Tingkat kemakmuran daerah, Struktur ekonomi dan gejolak inflasipun mudah diketahui. PDRB yang dihitung menurut sudut pengeluaran atau penggunaan ( Expenditure Method ) akan memperlihatkan perkembangan konsumsi rumah tangga, kemampuan dan kondisi perdagangan antar propinsi dan atau antar daerah/negara, besarnya investasi yang tertanam pada pembentukan modal yang akan menentukan tingginya peningkatan PDRB tahun-tahun berikutnya.

Selam 5 (lima) tahun terakhir rata-rata kenaikan PDRB Jawa Timur th. 1975 — 1980 menurut harga berlaku mencapai 26,22 %. Kenaikan tersebut sejak berakhirnya KNOP 15 — 1978 menggambarkan perubahan yang besar. Tahun 1978 — 1979 kenaikan PDRB 34,22 % dan selanjutnya 1979 — 1980 lebih tinggi lagi yaitu 38,49 %. Rata-rata kenaikan menurut lapangan usaha selama 1975 — 1980 ternyata mempunyai range 22,81 % — 43,35 %, dimana terendah untuk lapangan usaha jasa-jasa dan tertinggi untuk Pertambangan & Penggalian. Tahun 1976 — 1977 dan 1977 — 1978 kenaikan PDRB relatif rendah yaitu berkisar 18 — 19 %. Pengamatan lebih lanjut tentang hasil-hasil pembangunan juga dapat di ikuti dari rata-rata kenaikan PDRB yang dihitung berdasarkan harga konstan tahun 1975. Dengan cara ini, maka kita akan melihat rata-rata pertumbuhan riil yang tidak dipengaruhi inflasi dan sebagainya.

Menurut GBHN diharapkan rata-rata pertumbuhan PDB nasional sekitar 6,5 % pada akhir PELITA-III, ternyata realisasi pertumbuhan Jawa Timur th 1975 - 1980 mencapai 8,44 %, dan bahkan di atas rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 7,51 %.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 1979 - 1980 12,32 % dan diikuti tahun 1977 - 1978 10,33 %. Kenaikan terkecil terjadi untuk 1975 - 1976 ialah hanya 5,18 % Pertumbuhan tersebut sangat menggembirakan karena berada di atas rata-rata pertumbuhan penduduk Jawa Timur yang berkisar 1,49 % per-tahun. Dengan demikian income perkapita Jawa Timur selalu naik dari tahun ke tahun selama kurun waktu 1975 - 1980.

PDRB perkapita setahun th. 1975 s/d 1980 berturut-turut Rp. 68.711,-; Rp. 81.937,-; Rp.95.961,- ; Rp. 112.053,- ; Rp. 148.190 dan th. 1980 Rp. 202.213,- dibandingkan pendapatan perkapita Nasional untuk periode tersebut rupa-rupanya Jawa Timur baru sekitar 67 - 71 % nya rata-rata pendapatan nasional.

TABEL 1 : PDRB Jatim menurut harga berlaku dan harga konstan tahun 1975 - 1980 ( juta rupiah )

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	PDRB	Indeks	PDRB	Indeks
1	2	3	4	5
1975	1.853.404,76	100	1.853.404,76	100
1976	2.243.131,23	121,03	1.949.390,52	105,18
1977	2.666.237,51	143,86	2.111.869,37	113,95
1978	3.159.780,28	170,49	2.330.097,39	125,72
1979	4.241.162,03	228,83	2.470.385,21	133,29
1980	5.873.607,11	316,92	2.774.712,00	149,71

PDRB Jawa Timur menurut harga berlaku yang pada tahun 1975 bernilai Rp. 1853,4 milyar rupiah untuk tahun 1980 sudah menjadi Rp. 5873,6 milyar, sehingga indeks perkembangannya menunjukkan 316,92 ( 1975 = 100 ). Apabila dihitung dengan harga konstan maka indeks tersebut menunjukkan 149,71. Walaupun PDRB kelihatannya makin membesar, tetapi dengan pesatnya pembangunan diseluruh wilayah tanah air dengan berbagai bidang pembangunan maka bila dibanding

angka Nasional andil Jawa Timur hanya sekitar 14 % saja. Karena PDB Indonesia tahun 1975 dan 1980 masing-masing Rp. 12642,5 milyar dan Rp. 43765 milyar.

TABEL 2 : Perbandingan PDRB Jatim dan PDB Indonesia menurut harga berlaku 1975 - 1980.

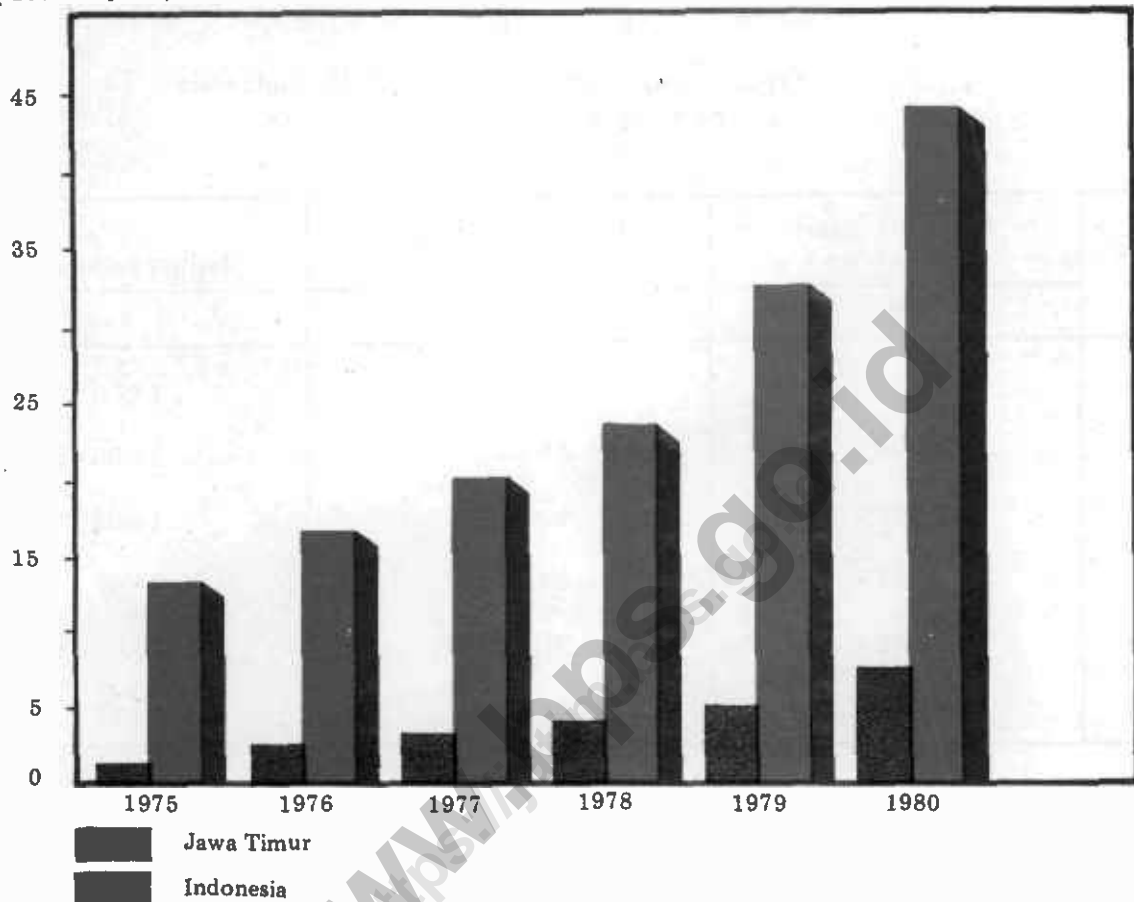
Tahun	P D R B Jatim ( milyar Rp )	P D B Indonesia ( milyar Rp )	% Jatim / Indonesia
1	2	3	4
1975	1.853,4	12.642,5	14,66
1976	2.243,1	15.466,7	14,50
1977	2.666,2	19.077,7	14,02
1978	3.159,8	22.458,3	14,07
1979	4.241,2	31.022,9	13,67
1980	5.873,6	43.765,0	13,42

Inflasi yang berhasil dihitung melalui indeks implisit ataupun yang lazim dari Indeks Harga Konsumen di Jawa Timur ternyata tidak jauh berbeda. Kedua indeks memperlihatkan gerakan yang searah. Dengan mengambil tahun 1975 sebagai dasar, maka tahun 1980 I H K menjadi 201 dan Indeks Implisit 212. Demikian pula inflasi tahunannya hanya berbeda sekitar 1 - 2 point saja.

Ini membuktikan bahwa kedua indikator yang dihitung secara terpisah, inflasi yang terjadi relatif sama. Menurut pengamatan tersebut inflasi tertinggi pada tahun 1979 dan 1980 masing-masing sekitar 23 - 26 % sedang tahun terendah pada tahun 1978 yaitu 4 - 7 %.

GRAFIK 1 : PERBANDINGAN PDRB JATIM DAN PDB INDONESIA  
MENURUT HARGA BERLAKU

( 1000 milyar )



Arah pembangunan pada dasarnya sudah digariskan oleh Pemerintah sesuai dengan GBHN. Maka peningkatan berbagai sektor dengan arah tetap berlandaskan pada sektor agraris menuju industrialisasi. Dalam kurun waktu 5 tahun dapat disajikan dan terbukti adanya penggeseran pola atau struktur perekonomian baik ditinjau menurut harga berlaku atau konstan. Menurut perhitungan harga berlaku sektor Pertanian mempunyai peranan 45,39 % (1975) turun menjadi 40,74 % (1980), sedangkan industri Pengolahan dari 11,93 % menjadi 15,67 %. Apabila dihitung pada harga konstant masing-masing berubah dari 45,39 % ke 41,00 % dan 11,93 % ke 14,31 % \*

Komposisi PDRB yang di lihat dari kelompok sektoral yang disusun atas 3 kelompok yaitu :

Sektor Primair yang terdiri dari Pertanian, Penggalian dan Pertambangan, Sektor Sekundair yang terdiri dari Industri, Listrik Gas dan Air serta bangunan dan Sektor Tertiar yang mencakup berbagai sektor lainnya/Jasa-jasa menyeluruh maka terdapat arah sesesuai harapan pembangunan.

Sektor Primair, Sekundair, Tertiar pada tahun 1975 mempunyai andil 45,59 % ; 13,12 % ; 41,29 % menjadi 40,41 % ; 17,04 % dan 42,55 % pada tahun 1980.

Sedang menurut harga konstan tahun 1980 masing-masing sektor menjadi 41,25 % ; 15,86 % dan



42,89 %.

Dari angka tersebut terbaca meningkatnya usaha pengolahan komoditi dan makin meluasnya sektor tertiar yang merupakan gambaran adanya geseran pola perekonomian. Seperti disebutkan terdahulu rata-rata pertumbuhan periode 1975 -- 1980 Propinsi Jawa Timur mencapai 8,44 % per-tahunnya. Dari sektor-sektor yang dihitung ternyata yang melebihi angka pertumbuhan tersebut yaitu sektor pertambangan/penggalian, Industri, Listrik gas dan air, Bangunan, Perdagangan dan Pemerintahan. Sebagai contoh akhir-akhir ini sangat terasa dampak positif program listrik masuk desa yang merupakan pendobrak peningkatan ekonomi di daerah Pedesaan Program air bersih tidak saja dilakukan oleh PDAM tetapi lebih jauh lagi terus di usahakan dalam rangka menuju masyarakat sehat dan sejahtera. Sektor-sektor lain rata-rata laju pertumbuhannya dibawah 8,44 %. Sektor yang mempunyai rata-rata pertumbuhan per-tahun tertinggi adalah pertambangan & Penggalian ( 24,83 % ) dan terendah Pertanian ( 6,23 % ). Untuk perbandingan kedua sektor terakhir ini untuk PDB Indonesia (nasional) masing-masing hanya 4,73 % dan 4,12 % sedangkan rata-rata pertumbuhan per-tahun tertinggi pada sektor Perbankan ( 15,29 % ) dan terendah sektor jasa-jasa 2,36 % .

Produk Domestik Regional Bruto selain dihitung menurut lapangan usaha / sektoral untuk mengetahui peranan dan perubahan-perubahan struktur perekonomian, juga perlu dihitung berdasarkan sudut penggunaan atau pengeluarannya. Di sadari menghitung secara bebas kedua metode tersebut belum mampu, mengingat keterbatasan kemampuan dewasa ini disamping sulitnya data yang di butuhkan.

Dengan menghitung PDRB dari sisi penggunaan ini akan dapat diketahui sejauh mana penggunaan dari pada nilai tambah dari semua produk-produk yang dihasilkan di kawasan ini. Pola penggunaannya juga sangat membantu berbagai analisa dan perencanaan pembangunan mendatang. Selain itu sangat bermanfaat sebagai bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan di masa yang lalu.

PDRB dari sisi penggunaan, sementara ini dikelompokkan menjadi 4 hal yaitu untuk :

Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Pembentukan modal tetap dan Net Ekspor (termasuk keluar masuk barang antar daerah) Karena langkanya data yang tersedia maka perubahan stok dan Konsumsi Lembaga Swasta yang tidak mencari untung dimasukkan sebagai residual dan digabung dengan Konsumsi rumah tangga.

Dalam periode 1975 --1980 penggunaan untuk Konsumsi rumah tangga di Jawa Timur telah ada perubahan. Tahun 1975 persentase konsumsi rumah tangga menurut harga berlaku dan harga konstan 1975 yaitu 65,51 %. Pada tahun 1980 data tersebut telah menjadi 60,72 % untuk harga berlaku dan 61,27 % untuk harga konstan. Angka tersebut membuktikan kalau pola pengeluaran relatif sudah tidak berorientasi pada konsumsi rumah tangga saja tetapi sebagian digunakan keperluan lain.

Dari tabel terlampir rata-rata konsumsi rumah tangga sekitar 65 % dari PDRB Jawa Timur baik untuk harga berlaku ataupun harga konstan. Untuk hal yang sama angka nasional/Indonesia untuk harga

berlaku rata-rata 65 % dan harga konstan hampir 70 %.

Untuk kurun waktu yang sama konsumsi pemerintah terjadi peningkatan persentasenya.

Pada th. 1975 baik harga berlaku ataupun konstan sebesar 17,87 % tetapi dalam tahun 1980 masing-masing menjadi 19,61 % dan 20,35 %. Hal ini diduga disebabkan semakin meningkatnya peranan pemerintah dalam pembangunan, bertambahnya jumlah pegawai negeri dalam tahun-tahun terakhir yang mengakibatkan membesarnya pengeluaran-pengeluaran rutin dan sebagainya. Pengeluaran-pengeluaran pemerintah tadi merupakan indikator besarnya produksi Pemerintah dan sekaligus indikator besarnya konsumsi pemerintah.

Penggunaan lain PDRB yaitu untuk pembentukan modal tetap bruto.

Pembentukan modal ini akan sangat menentukan terhadap perubahan-perubahan PDRB tahun-tahun selanjutnya. Pada lazimnya pembentukan modal baru dapat di petik hasilnya pada masa-masa berikutnya. Akan sangat mengkhawatirkan seandainya sebagian PDRB tidak digunakan pembentukan modal, artinya hasil upaya yang dilakukan hanya untuk keperluan konsumsi saja. Masa depan seperti ini akan suram dan akan banyak ketergantungan kepada pihak lain dan akhirnya daerah ini sulit berkembang. Peranan ini semakin meningkat, semula pada tahun 1975 menunjukkan peranan 17,99 %, tetapi untuk tahun 1980 baik untuk harga berlaku maupun harga konstan menjadi masing-masing 20,03 % dan 21,42 %. Kelihatan dari penggunaan ini bahwa selama Pelita-pelita yang lalu arah pembangunan mulai menggeser menuju hal yang tidak bersifat konsumtif. Dan memang terasa selama ini makin membesar usaha Pemerintah dalam menggalakkan penanaman modal/investasi berbagai bidang yang merupakan landasan, untuk melakukan lepas landas pembangunan-pembangunan lebih lanjut.

## BAB IV : PERKEMBANGAN PDRB SEKTORAL DI JAWA TIMUR

### 4.1. Nilai Absolut PDRB.

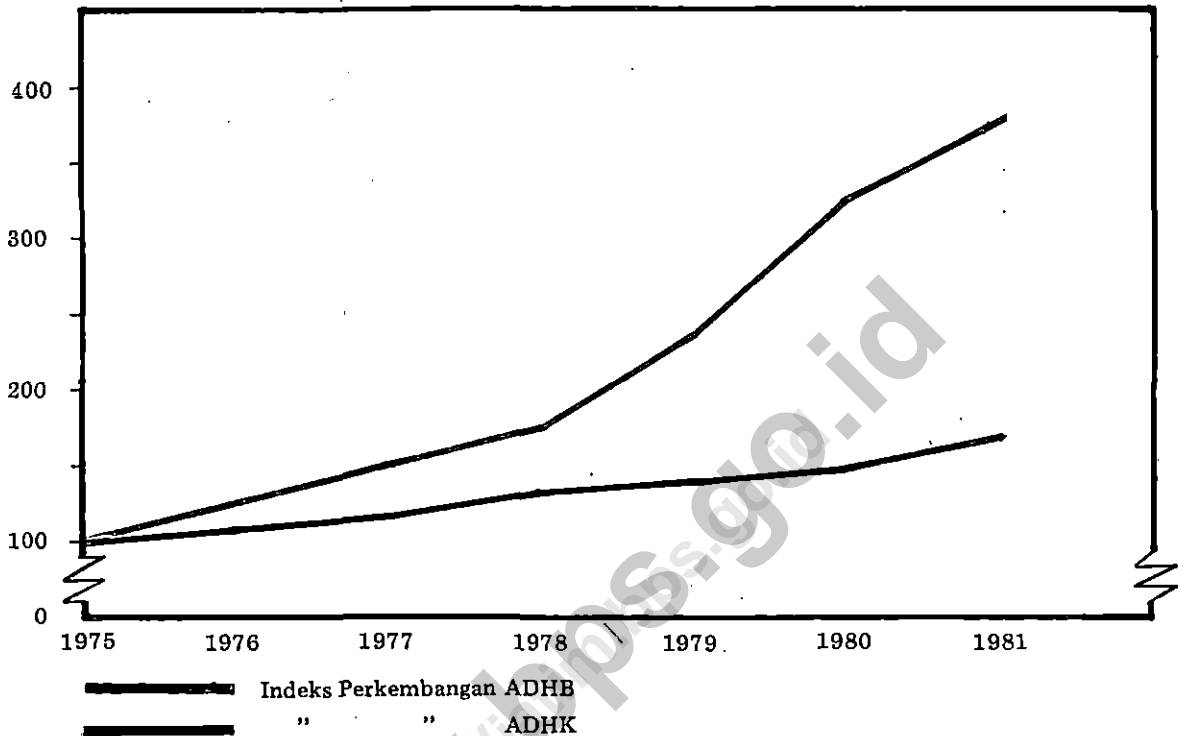
Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur tahun 1975 -- 1980 telah membuktikan betapa pesatnya pembangunan di wilayah ini. Apabila dihitung menurut harga berlaku, maka PDRB di Jawa Timur tahun 1975 s/d 1980 berturut-turut Rp. 1.853,4 milyar, Rp. 2.243,1 milyar, Rp. 2.666,2 milyar, Rp. 3.159,8 milyar, Rp. 4.241,2 milyar dan Rp. 5.873,6 milyar. Dengan demikian jika tahun 1975 mempunyai indeks 100 -- maka tahun 1980 membesar menjadi 317 atau telah menjadi 3 kali lipat lebih. Nilai tersebut sudah tentu masih di pengaruhi oleh gejala inflasi yang terjadi di Jawa Timur. Dengan menghitung PDRB atas dasar harga konstan maka berturut-turut PDRB tahun 1975 s/d 1980 sebagai berikut :

Rp. 1.853,4 milyar, Rp. 1.949,4 milyar, Rp. 2.111,9 milyar, Rp. 2.330,1 milyar, Rp. 2.470,4 milyar dan Rp. 2.774,7 milyar. Untuk tahun 1980 jika dinyatakan dalam indeks sebesar 150 (1975 = 100) jadi selama 5 tahun terakhir telah memperlihatkan adanya kenaikan riil sebesar 49,71 %.

Atau rata-rata pertumbuhan riil 9,94 % jika dihitung dari indeks perkembangan tersebut dan 8,44 % rata-rata pertumbuhan riil per-tahun. Perkembangan tersebut disebabkan besarnya dukungan semua faktor. Pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sektor yang dominan dalam PDRB Propinsi Jawa Timur 1975 dan 1980 menurut perhitungan harga berlaku antara lain sebagai berikut : Pertanian dari 841 milyar menjadi 2358 milyar di mana sub sektor terbesar andilnya adalah sub sektor Tanaman Bahan Makanan dari 659 milyar naik menjadi 1719 milyar, dan Perkebunan besar dari 56 milyar menjadi 295 milyar. Sektor lain yang dominan yaitu Perdagangan, Hotel dan Restoran dari 353 milyar ke 1301 milyar rupiah masing-masing tahun 1975 dan 1980 Sektor Industri Pengolahan yang terdiri dari Industri Besar, Industri Sedang, Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga data tahun 1975 sebesar 221 milyar menjadi 920 milyar untuk tahun 1980. Sektor Pemerintah mengalami kenaikan cukup tinggi juga dari 209 milyar pada tahun 1975 menjadi 639 milyar untuk tahun 1980. Selanjutnya sektor Pengangkutan dan Komunikasi dari 91 milyar ke 253 milyar.

Dengan memperhatikan grafik . 2 . . bisa terlihat perkembangan PDRB untuk periode 1975 -- 1980 baik menurut harga berlaku ataupun harga konstan 1975. PDRB harga konstan menunjukkan kenaikan yang mantap dan positif dari tahun ke tahun.

GRAFIK 2 : INDEKS PERKEMBANGAN PDRB. ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1975



Kemajuan pembangunan yang dicerminkan oleh perkembangan PDRB Jawa Timur tersebut dan pengecekan terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang bersangkutan, akan terhitung PDRB per-kapita setahun. Atas perhitungan harga berlaku PDRB per-kapita setahun berturut dari tahun 1975 s/d 1980 sebagai berikut : Rp. 68711 , Rp 81973 ; Rp. 95961 ; Rp. 112053 ; Rp. 148190,- dan Rp. 202213,-. Bila dinyatakan dalam pendapatan per-kapitanya masing-masing menjadi Rp. 63176,- ; Rp. 75944,- ; Rp. 87732,- ; Rp. 102312,- ; Rp. 135962,- dan Rp. 186292,- Data ini menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Perkembangan kenaikan pendapatan per-kapita tersebut diharapkan dapat di nikmati sebesar-besarnya oleh penduduk karena kenaikan total PDRB jauh diatas pertambahan penduduk Jawa Timur.

Yang menjadi masalah dan belum sempat terjawab adalah sampai dimana tingkat pemerataan hasil pembangunan tadi, khususnya sampai berapa jauh distribusi pendapatannya.

Series pendapatan Per — kapita yang dihitung atas dasar harga konstan akan membuktikan ada atau tidaknya kenaikan riil Pendapatan Penduduk sejak 1975 hingga 1980.

Hasil perhitungan menyatakan berturut-turut pendapatan riil sebagai berikut : Rp. 63.176,- ; Rp. 65.427,- ; Rp. 69.837,- ; Rp. 75.907,- ; Rp. 79.273,- dan Rp. 87.652,-. Atau dengan perkataan lain bahwa pendapatan riil penduduk telah meningkat hampir 40 % pada tahun 1980 dibanding keadaan pendapatan tahun 1975 dimana kenaikan pendapatan riil perkapitanya sekitar 6,8 %.

#### 4.2. Distribusi sektoral

Didalam Penyajian PDRB selain berupa nilai absolut dan bentuk indeks, dianggap sangat penting penyajian untuk melihat peranan dan struktur ekonomi yang diharapkan dan diperoleh dari kondisi ekonomi suatu daerah. Penyajian yang dimaksud yaitu berupa distribusi persentase dan atau peranan masing-masing sektor baik atas dasar harga berlaku ataupun konstan. Dengan mengamati peranan masing-masing sektor tersebut, akan mudah diketahui antara lain keberhasilan arah pembangunan daerah, penggeseran struktur ekonomi, sektor-sektor mana yang dominan, kegiatan apa saja yang dianggap masih perlu diprioritaskan, sebagai konsepsi perencanaan pembangunan antar sektor pada waktu yang akan datang.

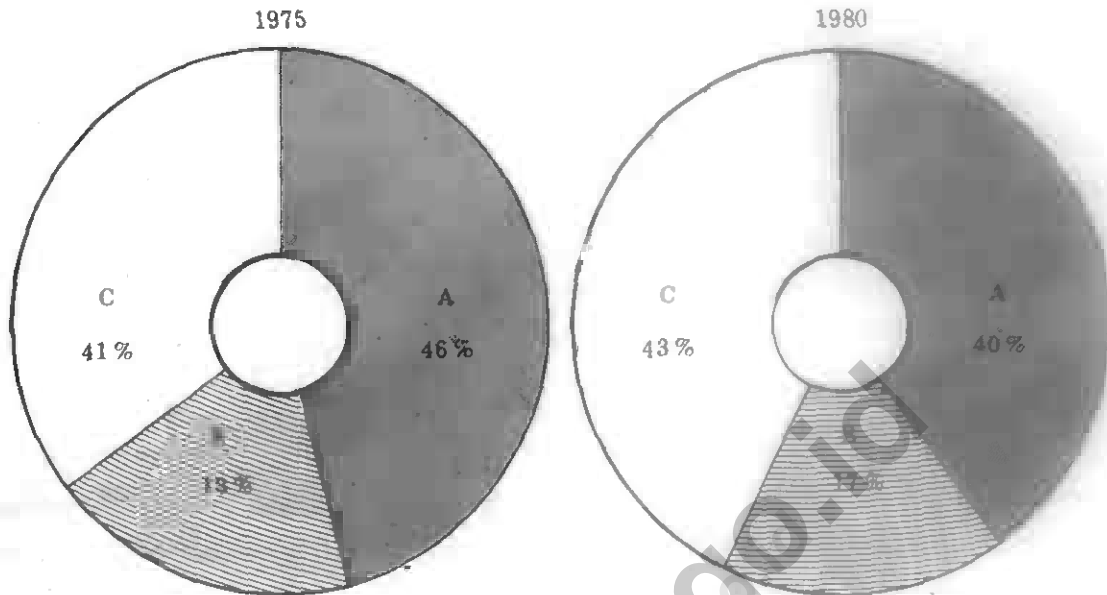
Distribusi PDRB Jawa Timur menurut kedua konsep harga kelihatan bahwa sektor-sektor yang tergolong kelompok sektor Primer yaitu Pertanian dan Penggalian & Pertambangan cenderung semakin menurun. Semula tahun 1975 peranannya 45,59 %, maka pada tahun-tahun berikutnya menjadi 44,54 %; 43,87 %; 42,92 %; 42,02 % dan 40,41 %. Demikian pula atas dasar harga konstan 1975 berturut-turut tahun 1976 s/d 1980 45,22 %, 44,16 %; 43,16 % ; 42,87 % dan 41,25 %.

Dilain pihak pada sektor sekunder ( Industri, Listrik air Gas dan Bangunan ) makin lama semakin membesar persentasenya. Menurut harga berlaku tahun 1975 13,12 % pada tahun 1980 17,04, sedang tahun 1980 menurut harga konstan 15,86 %.

Tabel 3 : Distribusi PDRB Jatim menurut harga berlaku dan harga konstan serta kelompok lapangan usaha ( % )

Tahun	Harga Berlaku			Harga Konstan		
	Sektor Primer	Sektor Sekunder	Sektor Tertiar	Sektor Primer	Sektor Sekunder	Sektor Tertiar
1	2	3	4	5	6	7
1975	45,59	13,12	41,29	45,59	13,12	41,29
1976	44,54	13,32	42,14	45,22	13,11	41,67
1977	43,87	13,94	42,19	44,16	13,57	42,27
1978	42,92	14,81	42,27	43,16	13,96	42,88
1979	42,02	15,69	42,29	42,87	14,36	42,77
1980	40,41	17,04	42,55	41,25	15,86	42,89

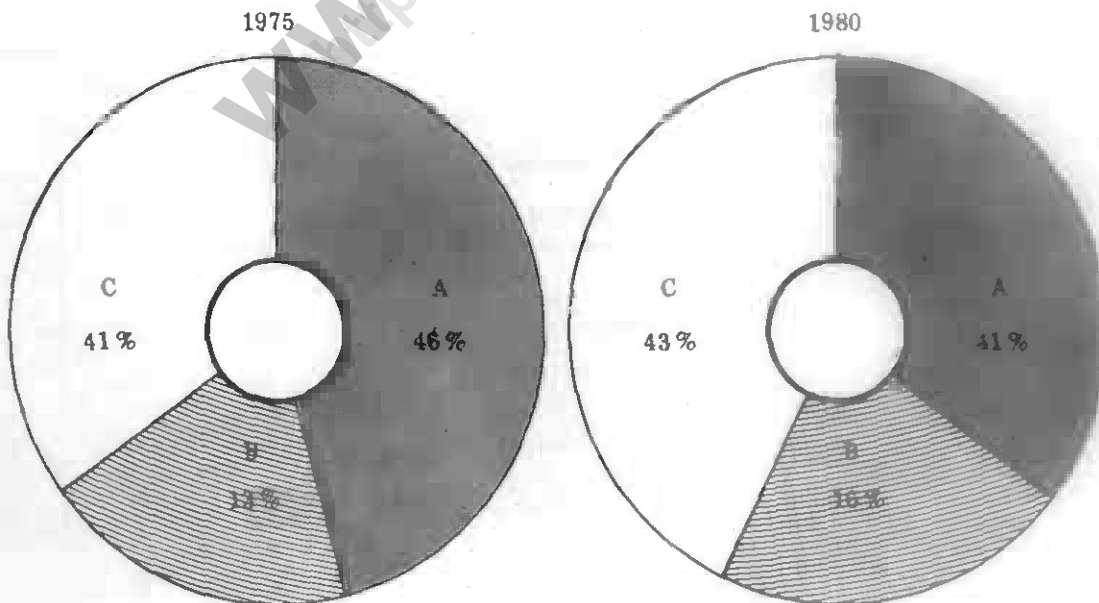
GRAFIK 3 : PERBANDINGAN SEKTORAL ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU



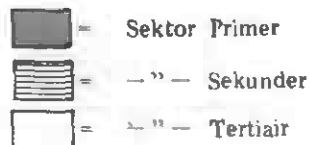
KETERANGAN :



GRAFIK 4 : PERBANDINGAN SEKTORAL ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1975.



KETERANGAN :



Sumbangan Sektor Pertanian dari tahun ke tahun selalu menurun, meskipun peranannya masih yang terbesar.

Dilihat atas harga berlaku Peranan pertanian tahun 1975 = 45,39% kemudian 44,12% (1976); 43,49% (1977); 42,65% (1978), 46,74% (1979) dan akhirnya 41,74% (1980). Akan lebih nyata lagi jika dihitung atas dasar harga konstan, berarti peranan riil tahunanpun menjadi turun. Berturut tahun (1975 s/d 1980) adalah : 45,39%; 44,75%; 43,72%; 42,86%; 42,60% dan 41,00%.

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mempunyai persentase yang besar pula dan dari tahun 1975 s/d 1980 mengalami kenaikan, yang semula 19,05 (1975) telah berubah menjadi 22,15% (1980) menurut harga berlaku; sedang atas harga konstan menjadi 20,76% untuk tahun 1980. sektor Perdagangan erat sekali hubungannya dengan sektor Pertanian, Industri, Penggalian & Pertambangan, karena perkembangan yang membesar pada 3 sektor akan sangat berpengaruh terhadap sektor Perdagangan. Dalam sektor ini sesuai dengan konsepsi yang dipakai termasuk pula Perdagangan besar, Perdagangan eceran, Perusahaan Restoran, Perhotelan dan Perusahaan Akomodasi lainnya.

Secara umum sektor Ini mempunyai kenaikan rata-rata tahunan yang lebih tinggi dibanding persentase kenaikan PDRB keseluruhannya.

Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor yang memiliki kedudukan tertinggi nomor tiga setelah Pertanian dan Perdagangan. Peranan sektor Industri dari tahun 1975 s/d 1980 menggeser yang semula 11,93% menjadi 15,67% untuk tahun 1980 menurut harga berlaku, sedang atas dasar harga konstan tahun 1980 juga naik menjadi 14,31%. Sub Sektor Industri Besar dan Sedang memegang sumbangan yang besar dalam sektor Industri, walaupun jumlah perusahaannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan Industri kecil dan kerajinan rumah tangga.

Trend peranan Industri dan Perdagangan ini naik sedangkan trend peranan Sektor Pertanian turun. Hal ini sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang tercantum dalam GBHN.

Sektor Pemerintahan peranannya relatif tidak banyak berubah sekitar 10 — 12%, namun demikian tidak berarti sumbangannya kecil dalam PDRB tahunan.

Perlu diketahui bahwa sektor ini sejalan dengan hasil pembangunan daerah baik dihitung menurut harga konstan ataupun berlaku, kenaikannya menunjukkan seimbang dengan kenaikan PDRB. Pada harga berlaku rata-rata kenaikan per tahun 25% dan harga konstan 9,6%.

Sektor pengangkutan dan komunikasi selama periode 1975 — 1980 peranannya relatif masih stabil, yaitu antara 4,3 — 5,2% menurut harga berlaku dan antara 4,6 — 4,9% menurut harga konstan. Angka tersebut rupanya tidak banyak berbeda dengan angka PDB Indonesia yang juga masih berkisar 4,5% menurut harga berlaku dan sekitar 5,5% menurut harga konstan. Dalam PDRB tetap memperlihatkan adanya kenaikan secara mantap. Dengan dasar tahun 1975 sebagai basis maka tahun 1980 menurut harga berlaku indeks perkembangan menjadi 279 dan menurut harga konstan menjadi 141. Rata-rata kenaikan sejak tahun 1975 s/d 1980 mencapai 7,8% suatu perubahan yang tidak kecil.

Sektor jasa-jasa di Propinsi Jawa Timur peranannya tidak begitu besar. Pengamatan sejak tahun 1975 s/d 1980 peranan sektor Jasa-jasa belum banyak berubah berkisar antara 2,02 — 2,50 % sedikit di bawah peranan jasa-jasa dalam PDB Indonesia yang terletak antara 2,5 — 3,0%. Sektor jasa-jasa mencakup jasa Perusahaan, Jasa Sosial dan Kemasyarakatan, Jasa Hiburan dan Kebudayaan, Jasa Perorangan dan Jasa Rumah Tangga. Pendataan sektor ini relatif paling sulit. Pada sektor ini meliputi kegiatan-kegiatan informal misalnya tukang cukur, seniman, tukang batu, tukang patri dsb. Walaupun peranannya terlihat kecil, tetapi bila dilihat nilai PDRB sektor jasa terjadi perubahan yang cukup besar yaitu dari 43 milyar lebih tahun 1975 menjadi 119 milyar untuk tahun 1980 menurut harga berlaku atau 59 milyar atas dasar harga konstan.

Sektor sewa rumah peranannya sedikit menurun menurut harga berlaku yaitu dari 2,37% turun menjadi 1,78%, sedang perhitungan atas dasar harga konstan tahun 1980 relatif sama sebesar 2,34% Nilai absolut sewa rumah antara 1975 s/d 1980 justru naik cukup tinggi yaitu 430 milyar lebih menurut harga berlaku atau naik hampir 120 milyar bila dihitung atas dasar harga konstan.

Sektor Bank dan Lembaga Keuangan lainnya selama periode 1975 s/d 1980 peranannya tidak banyak berubah antara 1,3 — 1,6%. Nilai tambah sektor Perbankan memang tidak besar, hal tersebut diduga sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang menetapkan bunga bank dan sebagainya rendah dalam rangka menunjang pembangunan di segala bidang, misalnya : industri, kerajinan, pedagang ekonomi lemah, pertanian, usaha menggalakkan kewiraswastaan dll. Khusus perkreditan yang menunjang pertanian ( Bimas, KUD, Inmas dsb. ) perputarannya memang lambat. Kalau kita perhatikan sektor ini pada PDB Indonesia juga tidak lebih dari 1,9%.

Sektor Bangunan dalam PDRB Jawa Timur memiliki andil tidak besar, tahun 1975 = 0,73% dan tahun 1980 sedikit meningkat menjadi 0,90% menurut perhitungan harga berlaku atau 1,01% atas dasar harga konstan. Nilai tambah ini mencakup Sub Sektor Bangunan Industri, Bangunan Pertanian seperti irigasi, prasarana umum dan Bangunan tempat tinggal dsb. Sektor bangunan ini jelas mempunyai peranan yang tinggi dalam pembentukan modal yang akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Sektor Pertambangan dan Penggalian mempunyai distribusi persentase yang berubah-ubah sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh sektor ini. Sektor ini meliputi Pertambangan, Penggalian, Penggaraman oleh rakyat. Peranan yang kecil sektor ini, karena eksplorasi minyak bumi yang sudah tidak ekonomis dan produksi kecil bahkan pada akhir-akhir ini sudah tidak berproduksi lagi.

Nilai tambah penggaraman juga relatif rendah. Usaha penggaraman yang dikelola oleh PN. Garam dan sebagainya tidak digolongkan di sini, sebab dimasukkan ke sektor industri.

Peranan sektor Pertambangan dan Penggalian hanya sekitar 0,20 — 0,27% kecuali untuk tahun 1976 dan 1977 masing-masing mencapai 0,42% dan 0,38% menurut harga berlaku atau 0,47% dan 0,44% atas dasar harga konstan.



### 4.3. Indeks Harga Implisit.

Indeks Harga Implisit yaitu indeks harga yang mampu menggambarkan perbandingan antara nilai produk yang dinilai atas harga berlaku dan nilai produk atas dasar harga konstan. Dari perbandingan tersebut indeks implisit dapat menggambarkan tingkat inflasi yang terjadi selama satu periode. Karena lazimnya PDRB biasa dilakukan tahunan, maka gambaran tingkat inflasi tersebut juga mencerminkan inflasi tahunan.

Indeks ini dapat memberikan tingkat inflasi yang lebih lengkap dan menyeluruh apabila dibandingkan dengan indikator lain yang selama ini dipergunakan Pemerintah misalnya: Indeks Bahan Pokok, Indeks Biaya Hidup/Indeks Harga Konsumen, Indeks Harga Perdagangan Besar. Seperti sudah diketahui PDRB merangkum kegiatan semua sektor/lapangan usaha, sehingga semua komoditi/jasa yang dihasilkan sudah terwakili. Demikian pula berbagai tingkat harga telah dipergunakan dalam menilai produk setiap sektor. Indeks Implisit sektor Pertanian lebih mencerminkan harga produsen, karena harga yang dipakai adalah harga lepas petani dan seterusnya. Dalam perhitungan PDRB perlu diketahui biaya antara yang pada umumnya dinilai atas dasar harga pembelian (harga beli input tersebut), demikian pula dengan dimasukkannya kegiatan angkutan yang berdasarkan harga eceran/konsumen. Dari penjelasan singkat tersebut dapat disimpulkan indeks harga implisit secara keseluruhan yang didasarkan pada PDRB lebih mencerminkan gabungan berbagai jenis dan tingkat harga.

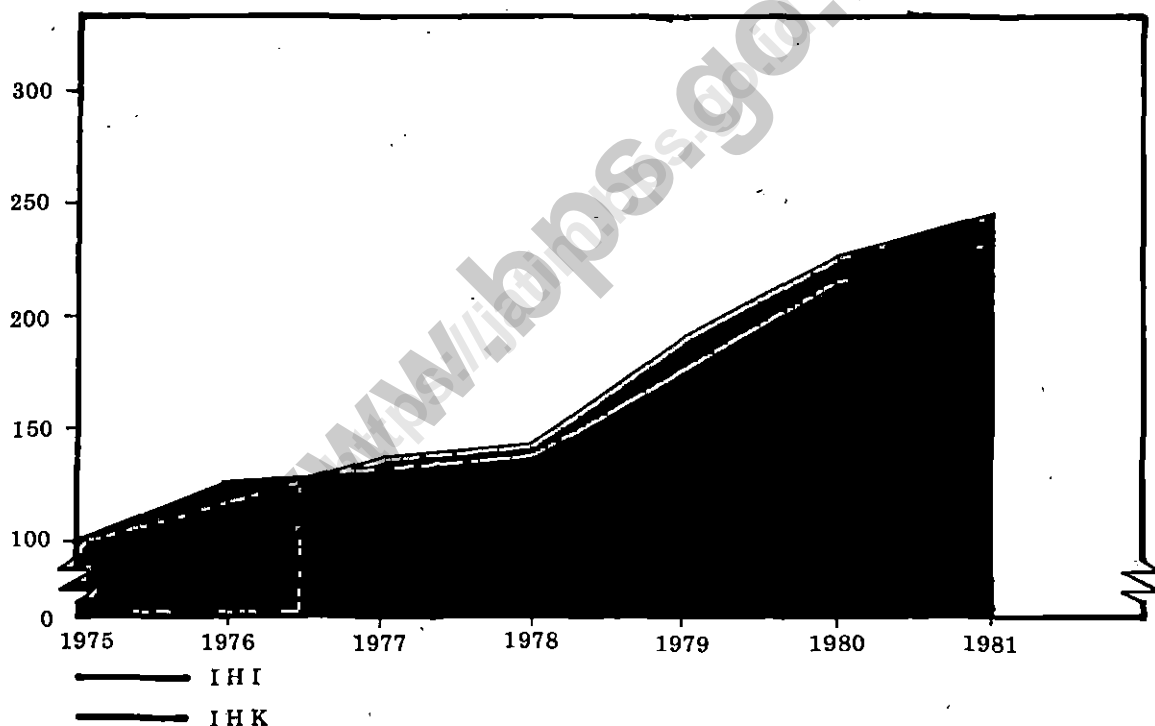
Tabel 4 : IHK di Surabaya ( Jatim ) dan Implisit Indeks PDRB Jatim  
Tahun : 1975 — 1980

Tahun	IHK	IHI	Inflasi menurut	
			IHK	IHI
1	2	3	4	5
1975	100	100	—	—
1976	: 116,44	115,07	16,44	15,07
1977	: 127,63	126,25	9,61	9,72
1978	: 132,88	135,61	4,11	7,41
1979	: 164,16	171,68	23,54	26,60
1980	: 202,43	211,68	23,31	23,30
1981	: 221,13	233,10	9,24	10,12

Mengamati tingkah laku antara Indeks Implisit ( IHI ) dan Indeks Harga Konsumen ( IHK ) Surabaya yang mewakili inflasi Jawa Timur, keduanya kelihatan berjalan searah dan tidak menunjukkan perbedaan yang heterogen. Tahun 1976 IHI lebih rendah dibandingkan IHK ; sedang untuk tahun-

tahun selanjutnya IHI selalu berada di atas IHK. Dari sini dapat dilihat bahwa gejala harga komoditi ( Jasa secara keseluruhan tidak semudah usaha stabilisasi harga-harga barang konsumsi rumah tangga. Setelah indeks harga konsumen ( IHK ) diadakan sedikit penggeseran tahun dasar dan dibandingkan dengan IHI, keduanya tidak menunjukkan hasil absolut yang berbeda IHK berturut-turut tahun 1975 s/d 1980 ialah 100, 116, 125, 132, 163 dan 201, sedangkan IHI sebesar 100, 115, 126, 136, 172 dan 212. Dengan demikian rata-rata tingkat inflasi per tahun sejak 1975 s/d 1980 IHK sebesar 15,40% dan IHI 16,42%. Perhitungan inflasi masing-masing untuk IHK dan IHI mulai 1976 adalah 16,44% dan 15,07% ; 1977 9,61% dan 9,72% ; 1978 4,11% dan 7,41% ; 1979 23,54% dan 26,60% dan 1980 23,31% dan 23,30%.

**GRAFIK 5 : INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK) DAN INDEKS HARGA IMPLISIT (IHI) PDRB JAWA TIMUR**

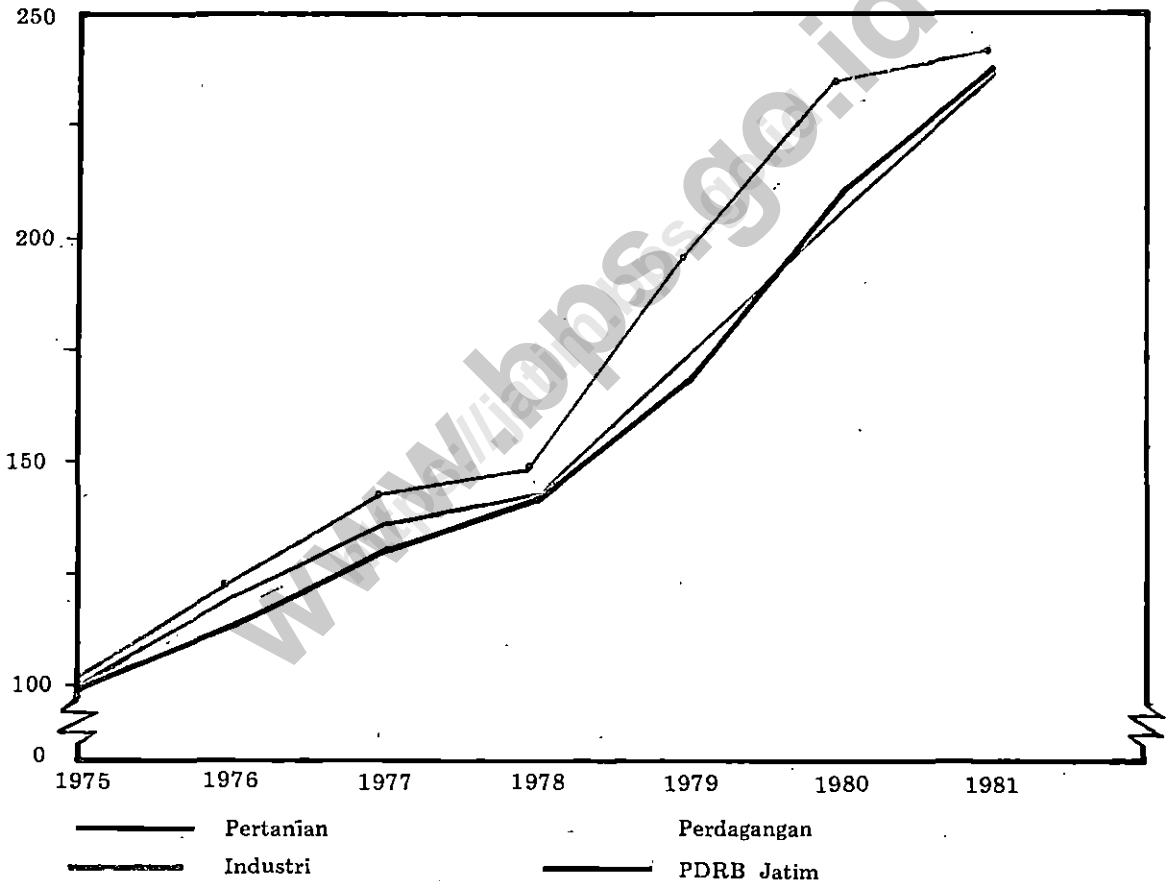


Apabila kita memperhatikan IHI setiap sektor, ternyata setiap sektor mempunyai indeks yang berbeda pada hasil perhitungan tahun 1980. Di bawah ini disajikan dari sektor yang tertinggi hingga terendah IHI 1980 : Industri 231,79 ; Bank & Lembaga Keuangan 228,33 ; Perdagangan dan sebagainya 225,83, Pertambangan 222,90 ; Pertanian 207,26 ; Jasa-jasa 202,14 ; Pengangkutan 198,09 ; Pemerintahan 195,81 ; Bangunan 189,63 ; Listrik Gas dan Air 184,51 dan terakhir sektor sewa rumah 161, 14. Rendahnya indeks implisit sektor sewa rumah diduga secara umum telah meluasnya pembangunan rumah tempat tinggal baik yang langsung ditangani oleh Pemerintah melalui Perumnas, Proyek KPR oleh Bank Tabungan Negara, Perusahaan Real Estate dan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat yang mengakibatkan kompetisi yang amat tinggi.

Dari indeks masing-masing sektor tadi, para perencana dapat mempergunakan informasi sederhana ini di dalam menentukan langkah-langkah dalam rangka program stabilisasi ekonomi di daerah Jawa Timur. Dan sekaligus diketahui prioritas mana yang dianggap perlu penanganan terlebih dahulu pada tahun-tahun mendatang.

Kalau kita memperhatikan IHI masing-masing sektor utama ternyata trend IHI relatif sejalan yang berarti inflasi antar sektor searah dalam pengertian yang tidak ada yang berlawanan dengan IHI PDRB Jatim.

GRAFIK 6 : INDEKS IMPLISIT SEKTOR PERTANIAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN P.D.R.B



#### 4.4. Pertumbuhan dan laju perkembangan PDRB Jatim.

##### 4.4.1. Pertumbuhan PDRB.

Pertumbuhan ekonomi Nasional dalam Repelita III diharapkan sekitar 6,5% per tahun. Ancer-ancer tersebut dicanangkan mengingat Pemerintah masih memprioritaskan tingkat pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya di seluruh wilayah tanah air.

Mengamati hasil-hasil pembangunan di Jawa Timur berdasarkan evaluasi perhitungan PDRB Jawa Timur 1975 - 1980, daerah ini dapat mencapai di atas target. Dan dapat dimengerti kalau pun

rata-rata pertumbuhan riil di Jawa Timur sedikit di atas angka target Nasional yaitu sebesar 8,44%. Kalau diperhatikan rata-rata pertumbuhan selama tahun 1975 — 1980, terdapat beberapa sektor kenaikannya di atas 10% yaitu Pertambangan, Penggalian, Industri, Listrik gas & air, Bangunan dan Perdagangan. Adapun sektor lainnya berada di bawah 10%.

Rata-rata pertumbuhan tertinggi pada sektor Pertambangan & Penggalian 24,83% dan terendah sektor Pertanian 6,23%. Pertumbuhan ekonomi yang masih dipengaruhi oleh masalah harga dan inflasi di Jawa Timur menggambarkan persentase yang jauh lebih tinggi yaitu rata-rata pertumbuhan tahun 1975 — 1980 sebesar 26,22% di mana pertumbuhan tertinggi pada sektor pertambangan/penggalian 43,35% dan terendah sektor jasa-jasa 22,81%. Berturut-turut dinyatakan pertumbuhan tahunan dibandingkan tahun sebelumnya (kenaikan indeks) 1976 : 21,03%, 1977 : 18,86%, 1978 : 18,51%, 1979 : 34,22% dan 1980 : 38,49%.

Untuk para analisa barangkali akan lebih mudah digunakan sebagai patokan atas dasar harga konstan 1975, sehingga benar-benar memberikan gambaran pertumbuhan riil berturut-turut tahun 1976 s/d 1980 adalah : 5,18%, 8,33%, 10,33%, 6,02% dan 1980 12,32% atau rata-rata riil 8,44%.

Sektor Pertanian rata-rata kenaikan riil 6,23% pada umumnya kenaikan setiap tahun sekitar 6 — 8% kecuali untuk tahun 1975 — 1976 yang agak rendah yaitu 3,69%. Usaha Penggalakan peningkatan produk sektor pertanian terus dilakukan dengan berbagai program.

a.l. Bimas, Inmas, Insus, diversifikasi berbagai tanaman, reboasasi, penyuluhan-penyuluhan dsb. Walaupun kenaikan riil kelihatan kecil 6%, tetapi Propinsi Jawa Timur tetap merupakan gudang pangan khususnya tanaman bahan makanan. Dan secara absolut 6% kenaikan tersebut sudah cukup baik, kalau dibandingkan dengan penambahan penduduk yaitu rata-rata sekitar 1,49% se tahun.

Sektor pertambangan & penggalian rata-rata kenaikan riil sangat tinggi yaitu : 24,83%. Angka ini disebabkan adanya kenaikan yang menyolok hampir 150% pada tahun 1975 — 1976 karena besarnya produksi minyak bumi di Jawa Timur (Sumber Ditjen Pertambangan Jakarta). Sedangkan tahun-tahun sesudahnya cenderung stabil dan bahkan terjadi penurunan yaitu tahun 1977 — 1978 dan 1978 — 1979. Perhatikan Tabel berikut ini.

**Tabel 5 : Rata-rata Kenaikan PDRB tahun 1975 — 1980  
Menurut Harga Konstan ( % )**

	1975-1976	1976-1977	1977-1978	1978-1979	1979-1980	Rata2 1975-1980
1	2	3	4	5	6	7
1. Pertanian	3,69	5,84	8,15	5,38	8,10	6,23
2. Pert/Penggalian	146,98	0,87	24,94	1,56	3,82	24,83
3. Industri	2,85	12,72	14,39	8,62	24,64	12,64
4. Listrik, Gas dan Air minum	6,22	9,22	20,70	14,90	10,61	12,33
5. Bangunan	41,40	6,77	0,23	12,39	22,30	16,62
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	8,74	6,93	12,25	8,58	15,10	10,32
7. Pengangkutan & Komunikasi	6,89	6,02	10,61	5,98	5,92	7,08
8. Perbankan	7,30	7,82	14,00	2,25	7,41	7,76
9. Sewa Rumah	8,10	8,13	8,15	8,18	8,20	8,15
10. Pemerintah	0,67	18,62	13,66	1,22	13,63	9,56
11. Jasa - jasa	7,26	6,07	5,81	3,86	8,29	6,26
<b>P D R B</b>	<b>5,18</b>	<b>8,33</b>	<b>10,33</b>	<b>6,02</b>	<b>12,32</b>	<b>8,44</b>

Sektor Industri tumbuh dengan mantap dan meyakinkan dengan rata-rata 1975 — 1980 sebesar 12,64%. Tahun 1975 — 1976 naik hanya 2,85% tahun berikutnya mulai kelihatan meningkat berturut-turut 12,72%, 14,39%, 8,62% dan 24,64%.

Hal ini diantaranya diakibatkan semakin besarnya investor menanamkan modal di Jawa Timur baik PMA ataupun PMDN, lebih-lebih makin ditingkatkannya industri kecil, penggalakan kegiatan kerajinan dan lain-lain sesuai dengan azas pemerataan yang diprogramkan oleh Pemerintah.

Sektor listrik gas dan Air minum tumbuh dengan baik, karena Pemerintah memperhatikan cukup besar untuk sektor ini, khususnya kelistrikan dan air bersih yang diwujudkan dalam program Listrik Masuk Desa dan Air bersih.

Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 1977 — 1978 sebesar hampir 21% dan 1978 — 1979 15%.

Sektor bangunan rata-rata kenaikan riil per tahun 16,62% dan kenaikan tertinggi 1975 — 1976 41,40% dan kedua tahun 1979 — 1980 22,30%. Kenaikan sekitar ini menyangkut baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka meningkatkan prasarana, sarana dan kemudahan.

Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran rata-rata kenaikan menurut harga berlaku tahun 1975 - 1980 sebesar 30,20%. Kenaikan tertinggi pada tahun 1978 - 1979 dan 1979 - 1980 masing-masing 43,83% dan 41,60%. Pengaruh dari pada gejolak harga masih terkandung di dalamnya. Untuk melihat pertumbuhan riil ternyata rata-rata tahun 1975 - 1980 sebesar 10,32% dan yang terbesar pada tahun 1977 - 1978 dan 1979 - 1980 masing-masing 12,25% dan 15,10%. Pertumbuhan riil ini sejalan dengan rata-rata pertumbuhan riil Sektor-sektor utamanya antara lain pertanian 6,23%, Industri 12,64% Listrik gas & Air 12,33%.

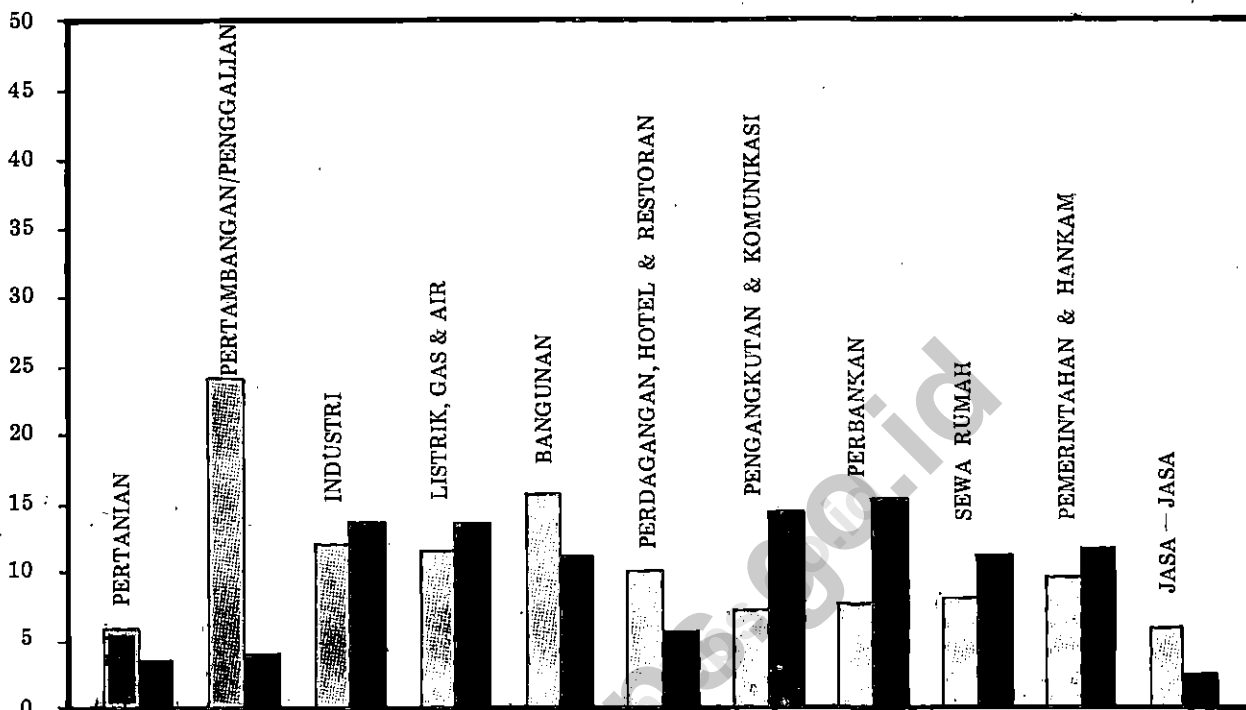
Sektor Pengangkutan & Komunikasi rata-rata pertumbuhan riilnya masih di bawah 10% yaitu 7,08%. Umumnya kenaikan riil tiap tahun sekitar 6% kecuali untuk tahun 1977 - 1978 agak tinggi sebesar 10,61%. Melihat pertumbuhan selama 5 tahun terakhir, sektor ini mempunyai pertumbuhan yang relatif sama dari tahun ketahun. Yang dilihat untuk perhitungan sektor ini cukup luas meliputi kegiatan Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Udara, Angkutan Kereta Api, Pos dan Giro, telekomunikasi dan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penunjang Angkutan.

Pertumbuhan sektor ini untuk setiap tahun apabila dihitung atas dasar harga berlaku rata-rata tahun 1975 - 1980 cukup tinggi mencapai 23,11% seperti tabel di bawah ini.

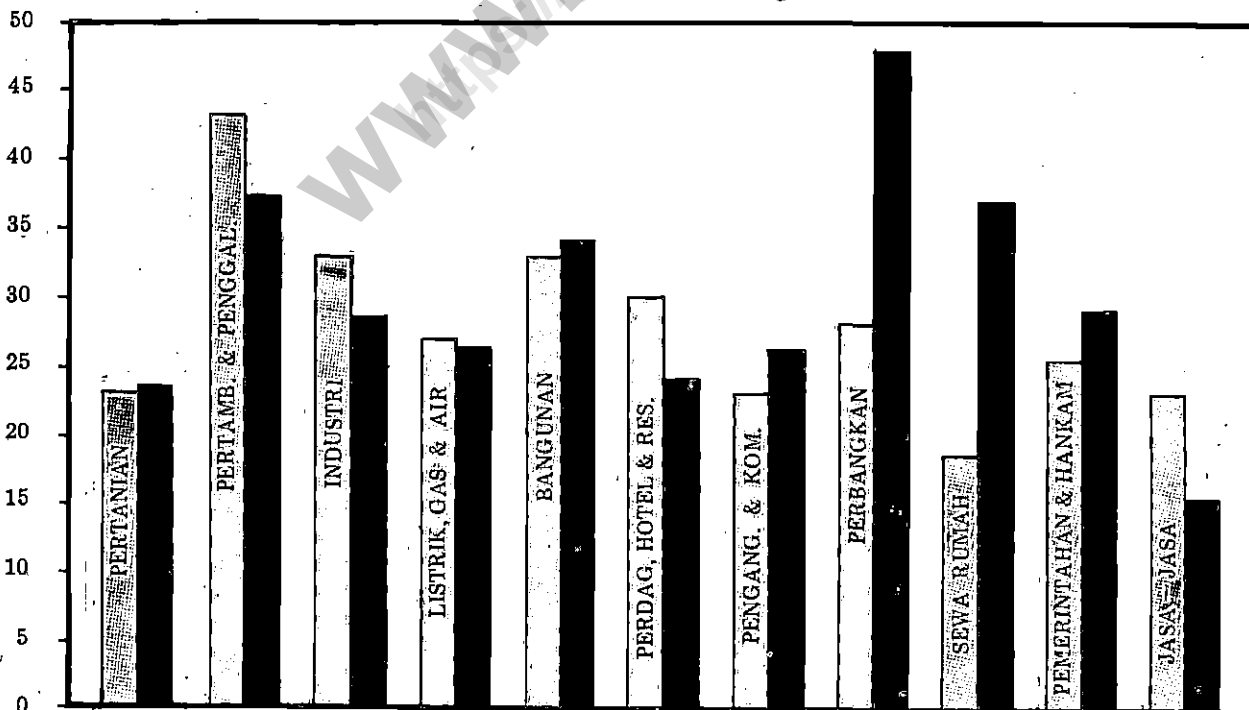
**Tabel 6 : Rata-rata kenaikan PDRB tahun 1975 - 1980  
menurut harga berlaku ( % )**

	1975-1976	1976-1977	1977-1978	1978-1979	1979-1980	Rata2 1975-1980
1	2	3	4	5	6	7
1. Pertanian	17,64	17,14	16,25	31,36	33,18	23,11
2. Pertambangan & Penggalian	156,08	5,69	14,40	34,83	34,56	43,35
3. Industri	21,18	25,52	26,90	43,34	50,42	33,47
4. Listrik, Gas & Air minum	30,25	19,90	26,83	7,90	53,64	27,70
5. Bangunan	46,67	12,75	8,96	47,24	48,65	32,85
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	24,55	18,47	22,57	43,83	41,60	30,20
7. Pengangkutan & Kom.	28,07	10,08	13,73	32,93	30,76	23,11
8. Perbankan	45,61	17,74	2,37	28,42	46,75	28,18
9. Sewa Rumah	17,44	12,96	12,10	22,66	30,71	19,17
10. Pemerintahan	17,22	27,73	19,70	22,14	39,64	25,29
11. Jasa - Jasa	29,03	10,32	9,15	29,48	36,06	22,81
<b>P D R B</b>	<b>21,03</b>	<b>18,86</b>	<b>18,51</b>	<b>34,22</b>	<b>38,49</b>	<b>26,22</b>

GRAFIK 7 : Perbandingan rata-rata laju pertumbuhan Jawa Timur dan Indonesia atas dasar harga konstan 1975 - 1980



GRAFIK 8 : Perbandingan Rata-rata Laju Pertumbuhan Jawa Timur dan Indonesia. Atas Dasar Harga Berlaku 1975 - 1980



KETERANGAN :  JAWA TIMUR  
 INDONESIA

Sektor Perbankan yang mempunyai peranan kurang lebih 1,4% dalam PDRB Jatim berdasarkan harga konstan 1975, rata-rata pertumbuhan riil 7,76% dengan range pertumbuhan 2,25 — 14,00% sedangkan rata-rata pertumbuhan yang masih dipengaruhi inflasi setinggi 28,18% dengan range 2,37% — 46,75%. Khususnya untuk pertumbuhan Riil rupanya tahun 1978 — 1979 sangat rendah yaitu 2,25%, hal ini mencerminkan jasa perbankan belum memasyarakat. Menyadari kondisi ekonomi yang demikian maka Pemerintah mengeluarkan KNOP 15 — 78 dan perubahan harga BBM awal 1979 yang rupanya dapat meningkatkan pertumbuhan sektor ini.

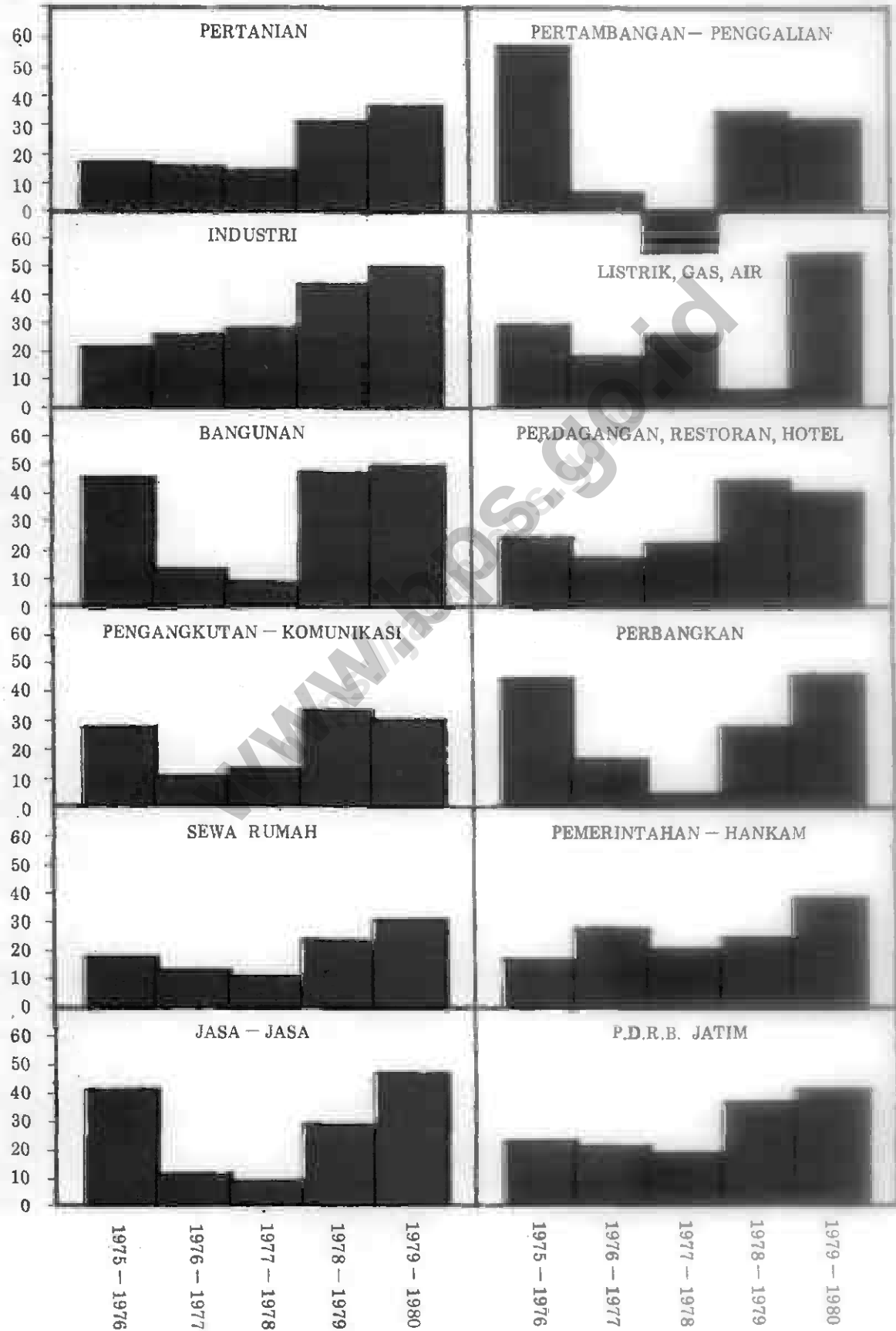
Sektor Sewa Rumah memiliki rata-rata pertumbuhan riil relatif stabil 8,15% namun rata-rata pertumbuhan berdasar harga berlaku cukup besar yaitu 19,17%, disebabkan kenaikan pada 1978 — 1979 dan 1979 — 1980 masing-masing 22,66% dan 30,71%.

Sektor Pemerintah laju pertumbuhan riil rata-rata 9,56% setiap tahun sesuai dengan derap pembangunan Pemerintah Daerah Jawa Timur di dalam usaha peningkatan pemberian pelayanan yang lebih baik kepada seluruh warga Jawa Timur yang tercermin dengan makin besarnya jumlah pegawai negeri sipil pusat dan Daerah serta aparat-aparat pemerintah lainnya.

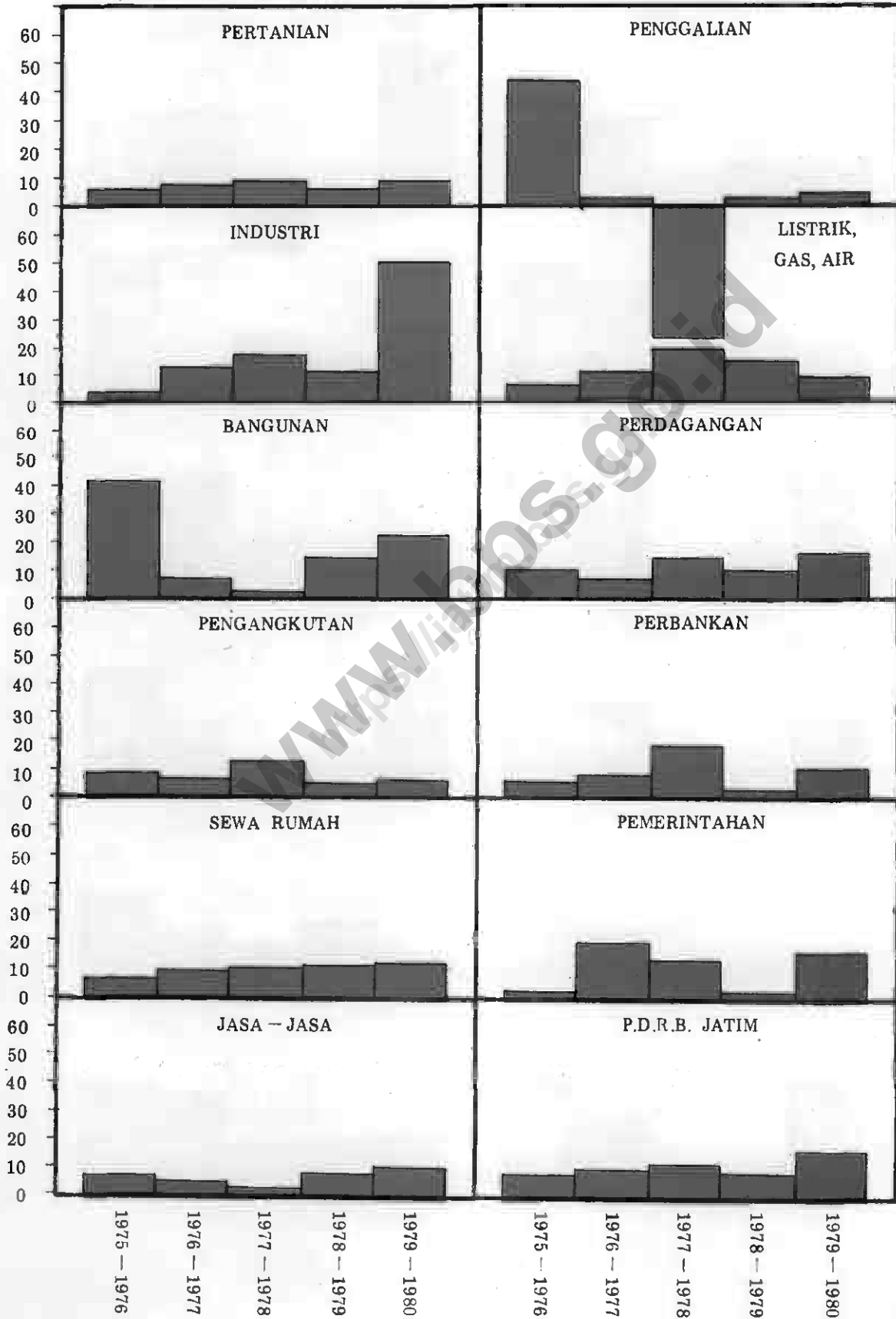
Sektor Jasa-jasa memiliki rata-rata pertumbuhan riil yang tidak kecil yaitu 6,26% pada tahun 1975 — 1980 kenaikan terendah terjadi hanya pada tahun 1978 — 1979. Hal ini kelihatannya mirip dengan sektor yang merupakan kelompok sektor tertiar yang lain seperti : Perbankan, Pengangkutan dan Pemerintahan yang pada tahun yang sama memiliki pertumbuhan riil relatif rendah. Namun pertumbuhan sektor ini masih lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional yang hanya 2,36%.



GRAFIK 9 : PERBANDINGAN KENAIKAN P. D. R. B. PER SEKTOR SETIAP TAHUN ATAS DASAR HARGA BERLAKU. TAHUN 1975 - 1980.



GRAFIK 10 : PERBANDINGAN KENAIKAN P. D. R. B. PER SEKTOR SETIAP TAHUN ATAS DASAR HARGA KONSTAN. TAHUN 1975 - 1980.



#### 4.4.2. Laju Perkembangan PDRB.

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh seluruh rakyat Jawa Timur bersama Pemerintah telah dapat memberikan hasil yang tidak sia-sia. Laju perkembangan PDRB yang digunakan sebagai indikator laju perkembangan perekonomian dengan melihat indeks perkembangan PDRB (1975 = 100 ) membuktikan keberhasilan pembangunan secara umum.

Indeks perkembangan atas dasar harga berlaku menunjukkan angka yang lebih tinggi. Hal ini tidak saja adanya peningkatan produksi secara fisik, tetapi masih didorong lagi dengan adanya perubahan-perubahan harga yang terjadi selama ini.

Kita tinjau secara agregatif dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1980 nilai produksi Jawa Timur telah menghasilkan hampir 1,5 kali produksi tahun 1975. Dengan melihat jumlah penduduk pertengahan tahun 1975 dan 1980 masing-masing 27 juta dan 29 juta naik hanya 7,4% maka jelas pembangunan memberikan hasil yang nyata terhadap tingkat kehidupan masyarakat di daerah Propinsi Jawa Timur.

Untuk beberapa sektor yang memiliki peranan besar yaitu Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pemerintahan rupanya perkembangannya tidak mutlak sama dengan peranannya tersebut. Sektor Pertanian yang memiliki peranan di atas 40% produksinya naik 35%, sektor Perdagangan peranannya sekitar 20% produksinya naik 63% pada tahun 1980 terhadap 1975, sektor Industri peranannya 12 — 14% produksinya pada tahun 1980 naik 80% terhadap keadaan 1975 dan sektor Pemerintahan yang berperan 10 — 12% kenaikannya untuk periode yang sama sebesar 56%.

Sektor-sektor yang mengalami kenaikan produksi di bawah kenaikan PDRB Jawa Timur ada 5 sektor yaitu Pertanian, Pengangkutan, Perbankan, Sewa Rumah dan Jasa-jasa. Khusus sektor Pertanian sub sektor Tanaman Bahan Makanan, Perkebunan Besar, Peternakan dan Perikanan relatif memiliki kenaikan per tahun di atas 5% sedangkan sub sektor Perkebunan Rakyat sangat rendah sekitar 2,4% per tahun. Lebih sub sektor Kehutanan justru terjadi penurunan produksi selama 5 tahun terakhir sekitar 5%.

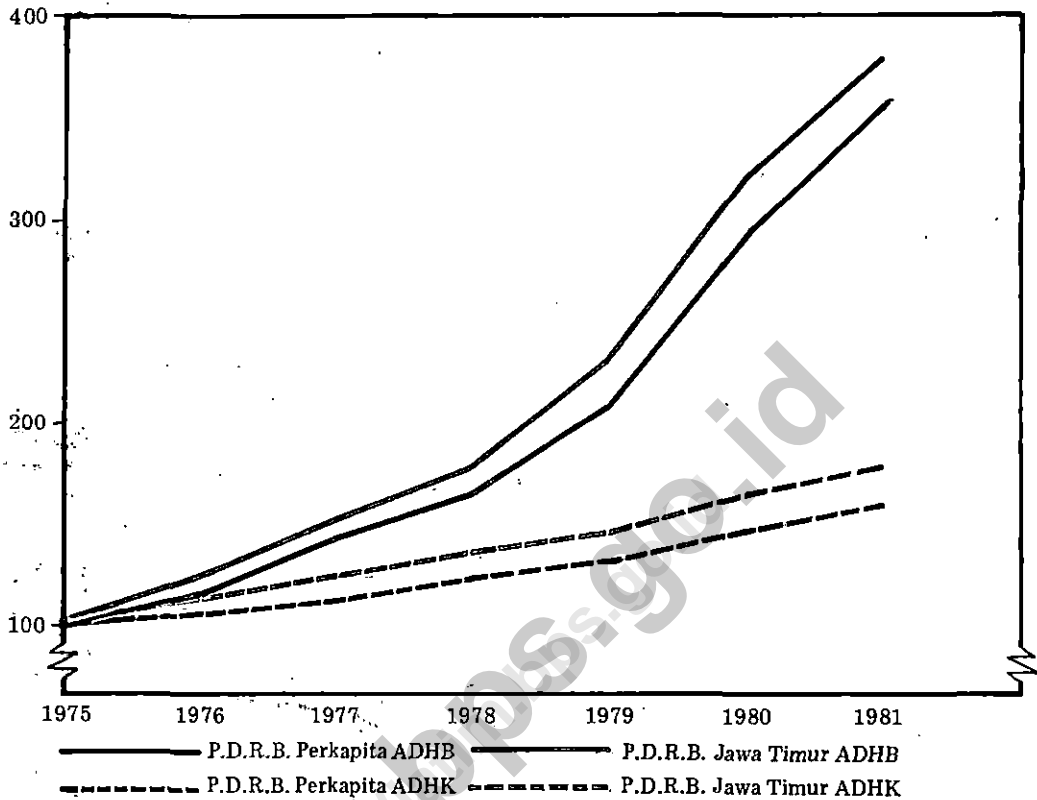
Indeks Perkembangan total PDRB Jawa Timur maupun PDRB per kapita baik dalam bentuk grafik, maupun dalam bentuk tabel ternyata selisih antara kedua indeks tersebut makin lama semakin melebar.

Indeks Perkembangan PDRB Jawa Timur, menurut :	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Harga berlaku	100,00	121,03	143,86	170,49	228,83	316,92
Harga Konstan	100,00	105,18	113,95	125,72	133,29	149,71
Selisih Angka	-	15,85	29,91	44,77	95,54	167,21

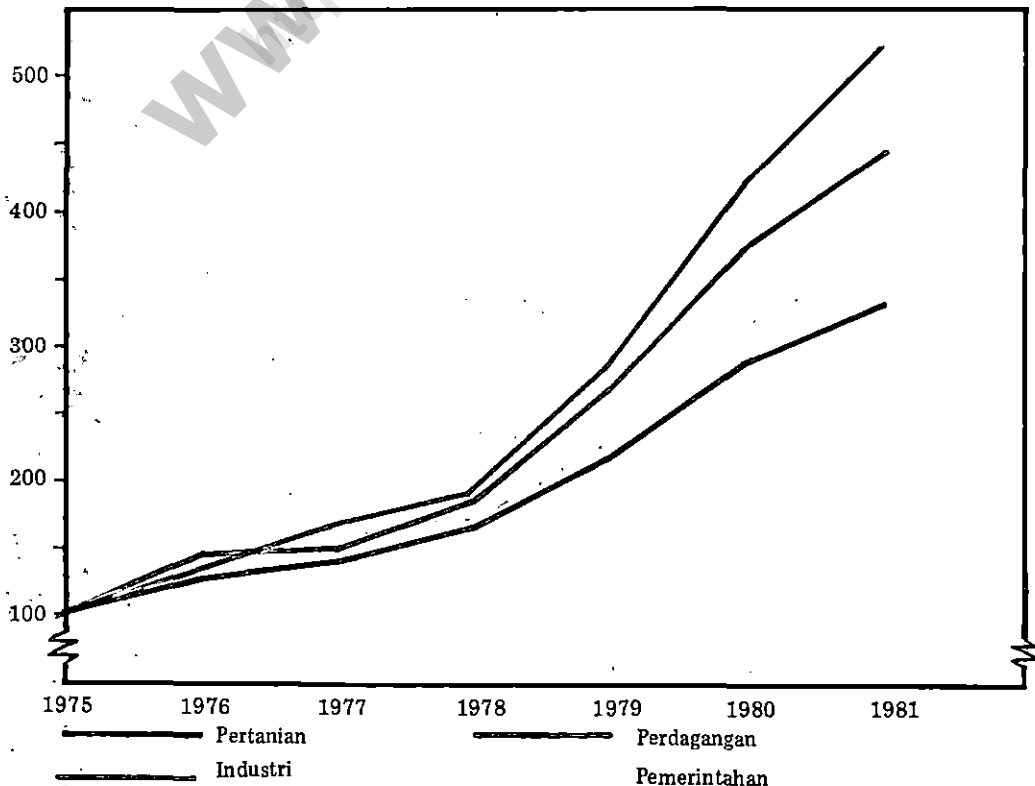
Tabel 7 : PDRB perkapita di Jawa Timur  
Tahun 1975 - 1980  
( Rupiah )

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	Perkapita	Indeks	Pendapatan Perkapita	Indeks
1	2	3	4	5
1975	68.711	100	68.711	100
1976	81.937	118,63	71.207	103,56
1977	95.961	138,87	76.009	110,54
1978	112.053	161,95	82.630	120,15
1979	148.190	215,21	86.318	125,48
1980	202.213	294,88	95.526	138,74

GRAFIK 11 : PERKEMBANGAN P. D. R. B. JATIM DAN P. D. R. B PER KAPITA MENURUT HARGA BERLAKU DAN KONSTAN 1975.



GRAFIK 12 : INDEKS PERKEMBANGAN SEKTOR-SEKTOR UTAMA P. D. R. B. JAWA TIMUR 1975 - 1981 ( 1975 = 100 ).



Apabila diamati lebih dalam sektor mana yang mempunyai gejolak harga lebih tinggi, kita dapat melihat tabel terakhir ( tahun 1980 ) indeks Perkembangan per sektor sebagai berikut :

**Tabel 8 : Indeks Perkembangan PDRB Sektoral  
menurut Harga Berlaku dan Konstan  
Tahun 1980.**

S e k t o r	Indeks Perkembangan		S e l i s i h
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
1	2	3	4
1. Pertanian	280,24	135,21	145,03
2. Pertambangan & Penggalian	420,30	188,56	231,74
3. Industri	416,16	179,54	236,62
4. Listrik, Gas dan Air minum	328,38	177,97	150,41
5. B a n g u n a n	394,41	207,99	186,42
6. Perdagangan	368,35	163,11	205,24
7. Pengangkutan	278,71	140,70	138,01
8. Perbankan	330,74	144,85	185,89
9. Sewa Rumah	238,43	147,96	90,47
10. Pemerintahan	305,68	156,11	149,57
11. Jasa — jasa	273,72	135,41	138,31
PDRB Jawa Timur	316,72	149,71	167,21

Dengan melihat selisih yang paling besar hingga yang terkecil, barangkali dapat diambil konklusi sederhana bahwa makin tinggi selisih kedua indeks makin besar pula gejolak-gejolak harga yang terjadi pada sektor-sektor yang bersangkutan dan sebaliknya. Dari sana bisa diketahui, sektor-sektor yang mengalami kenaikan-kenaikan harga yang tinggi yaitu hasil produk sektor Industri, Pertambangan & Penggalian, Perdagangan dan seterusnya sehingga sektor Sewa Rumah lah yang paling Stabil tingkat perubahan harganya.

#### 4.5. PDRB dan Pendapat Per Kapita.

Pertumbuhan dan perkembangan PDRB Daerah Propinsi Jawa Timur pada hakekatnya pencerminan hasil-hasil pembangunan di wilayah ini. Setelah Pemerintahan Orde Baru nampak adanya gambaran yang memperlihatkan kenaikan kesejahteraan penduduk.

Kita bisa menengok data PDRB baik PDRB total maupun per kapita dan sekaligus memperhatikan bagaimana tingkat kemajuannya selama Pelita I sampai dengan Pelita III

##### 4.5.1. Perbandingan sederhana dengan angka nasional.

Sebagai tolok ukur keberhasilan pada umumnya kita menggunakan patokan tertentu sebagai

tolok ukur ( yard stick ) untuk melihat apakah yang dihasilkan telah mencapai "target" atau justru masih jauh dari harapan. Untuk itulah dicoba membandingkan angka PDRB Jatim dan Indonesia. Luas Jawa Timur hanya 2,5% dari wilayah Indonesia, sedangkan penduduknya sekitar 20% dari penduduk Indonesia. PDRB yang dilakukan untuk Jawa Timur rupa-rupanya hanya sekitar-13,42 — 14,66% saja dari Produk Domestik Bruto Indonesia. Dari tahun ke tahun persentase ini makin mengecil disebabkan semakin majunya propinsi-propinsi lain sesuai dengan tujuan pembangunan itu sendiri yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya di seluruh wilayah tanah air. Perlu kita ketahui, saat ini banyak propinsi yang PDRB berkembang dengan pesat akibat kekayaan sumber alamnya seperti di Aceh, Sumut, Riau, Kaltim, Sulawesi, Irja dll. Akibat tersebut PDB Indonesia membesar sementara Jawa Timur dewasa ini hanya ditargetkan sebagai lumbung pangan nasional. Pengembangan yang pesat di Jawa Timur agak sulit misalnya untuk pertanian dengan terbatasnya areal, kekayaan alam minyak bumi tidak ada.

Dengan kekayaan alam yang terbatas tetapi besarnya sumber daya masyarakat disertai semangat juang yang tinggi ternyata peranan Jawa Timur tidak kecil terhadap sumbangan PDB Indonesia. Peranan yang tinggi tersebut berkembang dari waktu ke waktu, sebagai contoh untuk beberapa sektor utama berikut ini :

Tabel 9 : Peranan Sektor-sektor tertentu terhadap PDB Indonesia.

Sektor	Peranan sektor ini terhadap PDB Indonesia (%)		
	1975	1980	Keterangan
1	2	3	4
— Pertanian	21,01	20,95	Stabil
— Industri	19,68	23,93	naik
— Perdagangan	16,78	21,08	naik
— Jasa — jasa	6,45	11,94	naik

Kalaupun ada yang stabil atau turun tidak berarti tidak berkembang produk sektor tersebut di Jawa Timur; tetapi sektor tersebut di wilayah lain semakin meninggi peranannya, sehingga neraca absolut produk nasional menjadi lebih besar dibanding keadaan tahun 1975.

Untuk lengkapnya perhatikan tabel berikut.

Tabel 10 : Perbandingan P D R B Jawa Timur dan P D B Indonesia menurut lapangan usaha dan harga berlaku tahun 1975 & 1980

Sektor	1975			1980		
	PDRB Jatim (milyard)	P D B Indonesia (milyard)	% Jatim/ Indonesia	PDRB Jatim (milyard)	P D B Indonesia (milyard)	% Jatim/ Indonesia
1	2	3	4	5	6	7
1. Pertanian	841,33	4.003,4	21,01	2,357,74	11.252,5	20,95
2. Pertambangan/ Penggalian	3,73	2.484,8	0,15	15,68	11.672,5	0,13
3. Industri	221,14	1.123,7	19,68	920,31	3.845,5	23,93
4. Listrik, Gas dan Air minum	8,43	69,8	12,07	27,69	225,1	12,30
5. Bangunan	13,45	589,6	2,28	53,05	2.523,8	2,10
6. Perdagangan, Hotel Restoran	353,12	2.103,7	16,78	1.300,72	6.167,5	21,08
7. Pengangkutan & Komunikasi	90,75	521,2	17,41	252,93	1.706,1	14,82
8. Perbankan	25,06	151,4	16,55	82,89	1,046,9	7,92
9. Sewa Rumah	43,87	257,8	17,02	104,60	1.184,7	8,83
10. Pemerintahan & Hankam	209,08	864,3	24,19	639,11	3.144,6	20,32
11. Jasa - Jasa	43,43	672,8	6,45	118,89	995,8	11,94
	1.853,40	12.642,5	14,66	5.873,61	43.765,0	13,42



Tabel 11 : Perbandingan PDRB Jawa Timur dan PDB Indonesia per kapita ternyata PDRB Jawa Timur per kapita rata-rata 69% dari PDB Indonesia.

Perbandingan PDRB Jawa Timur dan PDB Indonesia  
Per kapita harga berlaku  
1975 — 1980

Tahun	J a t i m ( Rp )	Indonesia ( Rp )	Jatim/Indonesia (%)
1	2	3	4
1975	68.711	96.803	70,98
1976	81.937	115.683	70,83
1977	95.961	138.967	69,05
1978	112.053	160.416	69,85
1979	148.190	216.640	68,40
1980	202.213	298.533	67,74

Rata-rata PDRB Jawa Timur menurut harga berlaku tahun 1975 s/d 1980 Rp. 118.178,— sedang nasional Rp. 171.174,— Perkembangan angka Jawa Timur dengan dasar 1975 menjadi 294 ( 1975 — 100 ) sedang nasional menunjukkan 308. Disimpulkan PDRB nasional per kapita lebih cepat melejit dibanding PDRB Jawa Timur; diduga alasan-alasan yang dikemukakan sebelumnya menunjang masalah ini.

Sementara itu apabila dipelajari secara makro, pertumbuhan ekonomi secara riilpun di Jawa Timur sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional, karena masing-masing memiliki rata-rata pertumbuhan tahunan yang setingkat dan searah.

Tabel 12 : Perbandingan Rata-rata Pertumbuhan Riil  
PDRB Jawa Timur dan PDB Indonesia.

	Pertumbuhan riil (%)	
	Jatim	Indonesia
1975 — 1976	5,18	6,89
1976 — 1977	8,33	8,76
1977 — 1978	10,33	6,90
1978 — 1979	6,02	6,26
1979 — 1980	12,32	9,88
1975 — 1980	8,44	7,74

Untuk melengkapi informasi lebih lanjut akan kami sajikan rata-rata pertumbuhan PDRB riil pada propinsi-propinsi lain. Dari tabel tersebut kita akan melihat dimana posisi Jawa Timur saat ini.

**Tabel 13 : Perbandingan rata-rata laju pertumbuhan PDRB  
Jawa Timur dan Indonesia  
1975 - 1980 (%)**

Sektor	P D R B JATIM		P D B INDONESIA	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1	2	3	4	5
1. Pertanian	23,11	6,23	23,14	4,12
2. Pertambangan & Pengeksploasian	43,35	24,83	37,85	4,73
3. Industri	33,47	12,64	28,27	13,17
4. Listrik, Gas dan Air minum	27,70	12,33	27,46	13,69
5. Bangunan	32,85	16,62	34,50	11,63
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	30,20	10,32	24,25	6,72
7. Pengangkutan & Komunikasi	23,11	7,08	26,86	14,61
8. Perbankan	28,18	7,76	48,72	15,29
9. Sewa Rumah	19,17	8,15	36,66	10,96
10. Pemerintahan & Hankam	25,29	9,56	29,69	11,67
11. Jasa - jasa	22,81	6,26	16,19	2,36
	26,22	8,44	28,52	7,51

#### 4.5.2. Pendapatan Perkapita sejak Pelita I

Pengertian pendapatan perkapita setahun di sini yaitu rata-rata Produk Domestik Regional Neto (PDRN) dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Adapun PDRN diperoleh dari PDRB dikurangi penyusutan barang modal dan Pajak Tak Langsung Neto. Di sini kami akan melihat pendapatan perkapita menurut harga berlaku, karena biasanya data inilah yang umumnya diperhatikan pemakai data.

Pendapatan perkapita Jawa Timur sejak awal pelita I hingga pelita III mempunyai trend naik. Kalau tahun 1969 sebesar Rp. 18.804,- maka tahun 1974 menjadi Rp. 44.698,-, tahun 1979 Rp. 135.691,- dan tahun 1980 Rp. 186.292,- ; angka sementara tahun 1981 Rp. 219.957,-. Dengan membuat indeks 1969 = 100, maka tahun 1980 indeks menjadi 991 dan 1981 sebesar

1.170. Dengan perkataan lain pendapatan perkapita sejak awal pelita I hingga pertengahan pelita III telah naik menjadi 10 — 12 kali lipat. Seandainya dinyatakan dalam rata-rata pendapatan per kapita dalam pelita I Rp. 27.055,— Pelita II Rp. 79.110,— dan sebagian pelita III sudah mencapai Rp. 171.626,—.

Sebenarnya memang tidak pernah dihitung PDRB menurut tahun anggaran (tahun-tahun dalam Pelita), tetapi untuk keperluan tersebut dicoba dihitung dengan anggapan perkembangan ekonomi triwulan pertama suatu tahun relatif sama dengan triwulan-triwulan lainnya.

Sebagai contoh untuk mendapatkan pendapatan per kapita tahun 1974/1975 diperoleh dari pendapatan per kapita tahun 1974 diambil 75% dan ditambah dengan 25% pendapatan per kapita tahun 1975 dan seterusnya.

Untuk masalah yang sama pendapatan per kapita nasional menunjukkan pada tahun 1969, 1974, 1979, dan 1981 masing-masing Rp. 20.880,— ; Rp. 70.987,— ; Rp. 189.573,— ; dan Rp. 308.829,—. Dengan tahun 1969 sebagai dasar maka indeks tahun 1981 sebesar 1.479, atau pendapatan per kapita penduduk Indonesia pertengahan Pelita III telah hampir 15 (limabelas) kali lipat terhadap pendapatan pada awal Pelita I. Kepesatan perubahan pendapatan untuk Jawa Timur memang kelihatan kalah laju disebabkan adanya pengaruh perkembangan propinsi-propinsi lain, lebih-lebih dengan diketemukan sumber-sumber minyak bumi baru dan sumber-sumber kekayaan lainnya di luar Jawa Timur. Hal ini semua akan memperbesar pendapatan penduduk Indonesia. Pendapatan per kapita absolut penduduk Jawa Timur lebih rendah dibanding rata-rata angka nasional disebabkan besarnya penduduk Jawa Timur (20% penduduk Indonesia) dan rendahkan peranan PDRB Jawa Timur dibanding PDRB Indonesia ( hanya 13 — 15% ).

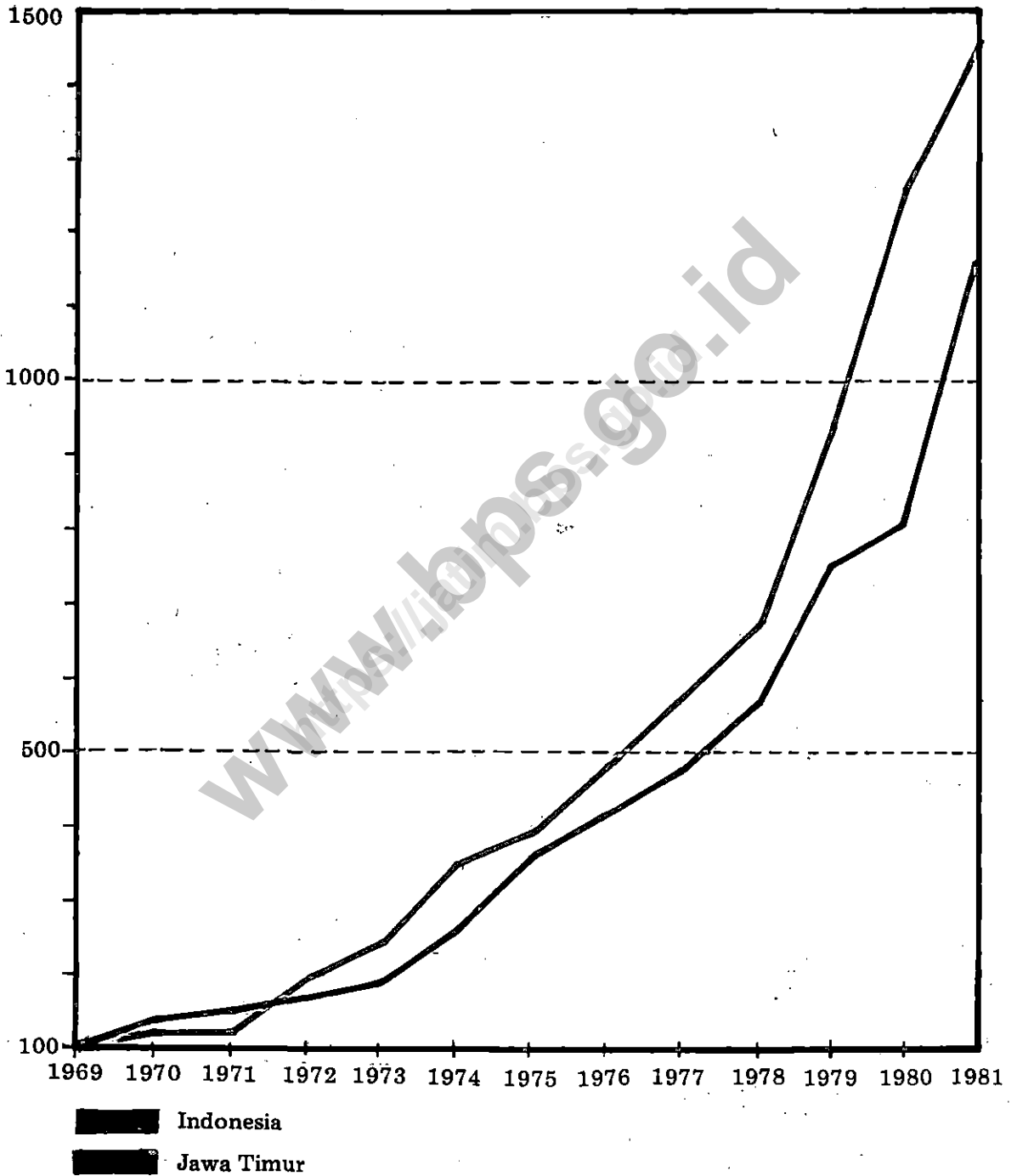
Tabel berikut perbandingan pendapatan per kapita penduduk Jawa Timur dan Indonesia menurut harga berlaku tahun 1969 — 1981.

**Tabel 14 : Perbandingan Pendapatan Per kapita  
di Jawa Timur dan Indonesia  
Tahun 1969 - 1981.**

Tahun	Jawa Timur		Indonesia	
	Rupiah	Indeks	Rupiah	Indeks
1969	18.804	100	20.880	100
70	23.462	125	24.811	119
71	23.949	127	26.411	126
72	27.747	148	31.841	153
73	34.840	185	46.073	221
74	44.698	238	70.987	340
75	63.048	335	82.286	394
76	74.944	399	99.758	478
77	87.732	467	118.793	569
78	102.312	544	138.340	662
79	135.961	723	189.573	908
80	186.292	991	264.804	1.268
81	219.957 *)	1.170	308.829	1.479

\*) angka sementara.

**GRAFIK 13 : INDEKS PERKEMBANGAN PENDAPATAN PERKAPITA DI INDONESIA DAN JAWA TIMUR MENURUT HARGA BERLAKU**



## BAB V PDRB JAWA TIMUR MENURUT SEGI PENGGUNAAN

Penyajian PDRB Jawa Timur menurut segi penggunaan atau pengeluaran (expenditure on Gross Domestic Regional Product) baru pada kesempatan ini dapat dipublikasikan. Walau wistim yang dipergunakan belum dapat dikatakan sempurna, mudah-mudahan data yang dihasilkan akan mampu memberikan gambaran umum bagaimana sebenarnya pemanfaatan hasil-hasil pembangunan di wilayah ini. Pada bab-bab terdahulu hanya diulas hasil-hasil yang dicapai masing-masing sektor termasuk perkembangan dan pertumbuhannya, maka dalam bab V ini akan dibahas untuk apa saja kenaikan-kenaikan produk tersebut dipergunakan oleh masyarakat Jawa Timur. Diakui bahwa dalam penghitungan masih dijumpai kelemahan-kelemahan diharapkan akan diperbaiki pada perhitungan-perhitungan yang akan datang.

### 5.1. Komposisi penggunaan PDRB Jatim.

PDRB Jatim atas dasar harga berlaku sejak tahun 1975 hingga 1980 cenderung naik, masing-masing sebagai berikut : 1.853 milyar (1975) 2.243 milyar (1976), 2.666 milyar (1977), 3.160 milyar (1978), 4.241 milyar (1979), dan 5.874 milyar (1980).

Dari PDRB sesungguhnya masih cukup besar penggunaannya untuk konsumsi rumah tangga. Besarnya keperluan untuk konsumsi rumah tangga pada masing-masing tahun sejak 1975 s/d 1980 adalah 1.214 milyar, 1.529 milyar, 1.724 milyar, 2.038 milyar, 2.454 milyar dan 3.566 milyar. Atas rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita selama setahun untuk penduduk Jawa Timur sejak 1975 s/d 1980 masing-masing sebagai berikut : Rp. 45.012,- ; Rp. 55.845,- ; Rp. 62.031,- ; Rp. 72.263,- ; Rp. 85.731,- dan Rp. 122.784,-. Membandingkan konsumsi rumah tangga per kapita setahun dengan rata-rata pendapatan per kapita setahun seperti pada uraian bab 4.5.2, ternyata pendapatan yang diperoleh tidak semuanya digunakan sebagai kebutuhan konsumsi rumah tangga.

PDRB Jatim tidak saja untuk penggunaan konsumsi rumah tangga, tetapi juga untuk pengeluaran-pengeluaran keperluan konsumsi Pemerintah, pembentukan modal tetap dan juga digunakan untuk keperluan penggunaan di luar wilayah yang merupakan pengeluaran neto atas barang-barang keluar masuk baik antara negara ataupun antar Propinsi (Daerah). Selain itu PDRB juga dipergunakan untuk konsumsi lembaga-lembaga yang tidak mencari keuntungan ( Privat non-profit institution ) dan penambahan stock. Karena untuk menghitung 2 hal terakhir dirasakan masih sulit, maka keduanya digabung saja pada komponen penggunaan konsumsi rumah tangga.

Konsumsi Pemerintah menurut penghitungan mengalami kenaikan terus dari tahun ke tahun sesuai dengan meningkatnya permintaan pelayanan pembangunan. Untuk menilai besarnya konsumsi Pemerintah agak sulit, sehingga untuk memperkirakannya diambil suatu anggapan bahwa apa yang dikonsumsi Pemerintah yaitu apa saja dihasilkan oleh Pemerintah. Pada penghitungan ini produksi

Pemerintah dianggap sama dengan konsumsi Pemerintah.

Tidak dimasukkan di sini barang-barang/jasa yang dijual kepada masyarakat dan pembentukan modal yang dilakukan Pemerintah sendiri karena tidak mungkin diterima dari pihak lain. Tegasnya yang dimasukkan konsumsi Pemerintah hanya meliputi belanja pegawai, belanja barang baik yang bersumber dari anggaran rutin maupun dari anggaran pembangunan termasuk keperluan pertahanan dan keperluan peralatan perang. PDRB untuk konsumsi Pemerintah sekitar 30% saja dari konsumsi rumah tangga. Besarnya pengeluaran ini berturut-turut sejak tahun 1975 s/d 1980 adalah 331 milyar, 391 milyar, 481 milyar, 596 milyar, 804 milyar dan 1.151 milyar. Sehingga perkembangan untuk tahun 1980 konsumsi ini hampir 3,5 kalinya konsumsi tahun 1975. Rupanya hampir sejalan dengan indeks perkembangan PDRB keseluruhan.

Dari tahun 1975 menunjukkan nilai untuk pembentukan modal 334 milyar 1976 428 milyar, 433 milyar tahun 1977, 504 milyar tahun 1978, 725 milyar tahun 1979 dan 1.177 milyar untuk tahun 1980. Kalau dilihat prosentase angka ini berkisar 16 — 20% dari PDRB Jatim.

Dari seluruh total pembentukan modal tetap tadi dapat dipisahkan menjadi 3 hal masing-masing dari PMA + PMDN, kredit-kredit yang dilepas oleh bank ( KIK + KMKP ) dan dari Pemerintah sendiri misalnya untuk pembangunan, sarana dan prasarana jalan, gedung-gedung dan barang-barang modal lainnya. Andil dari ketiga sumber tersebut rata-rata masing-masing sektor 18% 15% dan 67% selama kurun waktu 1975 — 1980.

Penggunaan lain PDRB yaitu untuk mengurus dan membiayai barang-barang yang berada di luar wilayah setelah dikurangi barang yang masuk dari luar wilayah, tegasnya di sini adalah mencari net — ekspornya. Pengertian ekspor adalah barang-barang yang keluar wilayah baik keluar negeri dan atau ke Propinsi lain di luar Jatim. Sedangkan pengertian masuk yaitu barang-barang yang masuk dari Propinsi lain dan atau dari luar negeri. Jadi di sini harus melihat arus barang tadi baik via darat, laut maupun udara. Total nilai barang yang ke luar wilayah Jawa Timur akan membuktikan sampai berapa jauh potensi Jawa Timur dalam dunia perdagangan antar negara/daerah. Nilai arus barang yang keluar lebih tinggi dibandingkan barang yang masuk terjadi untuk tahun 1977, 1978 dan 1979. Sedang tahun 1975 1976 dan 1980 ternyata nilai barang yang masuk lebih besar dari pada nilai barang yang ke luar Jawa Timur baik ke luar negeri ataupun ke luar wilayah Jawa Timur. Dari penilaian harga konstan 1975 memang tampak bahwa selama periode 1975 — 1980 umumnya arus barang yang masuk lebih tinggi dibanding yang ke luar kecuali untuk tahun 1979.

## 5.2. Distribusi penggunaan PDRB.

Pola PDRB Jawa Timur menurut sudut penggunaan sejak tahun 1975 terdapat adanya penggeseran peranan baik menurut harga berlaku ataupun harga konstan. Masing-masing perincian dalam PDRB

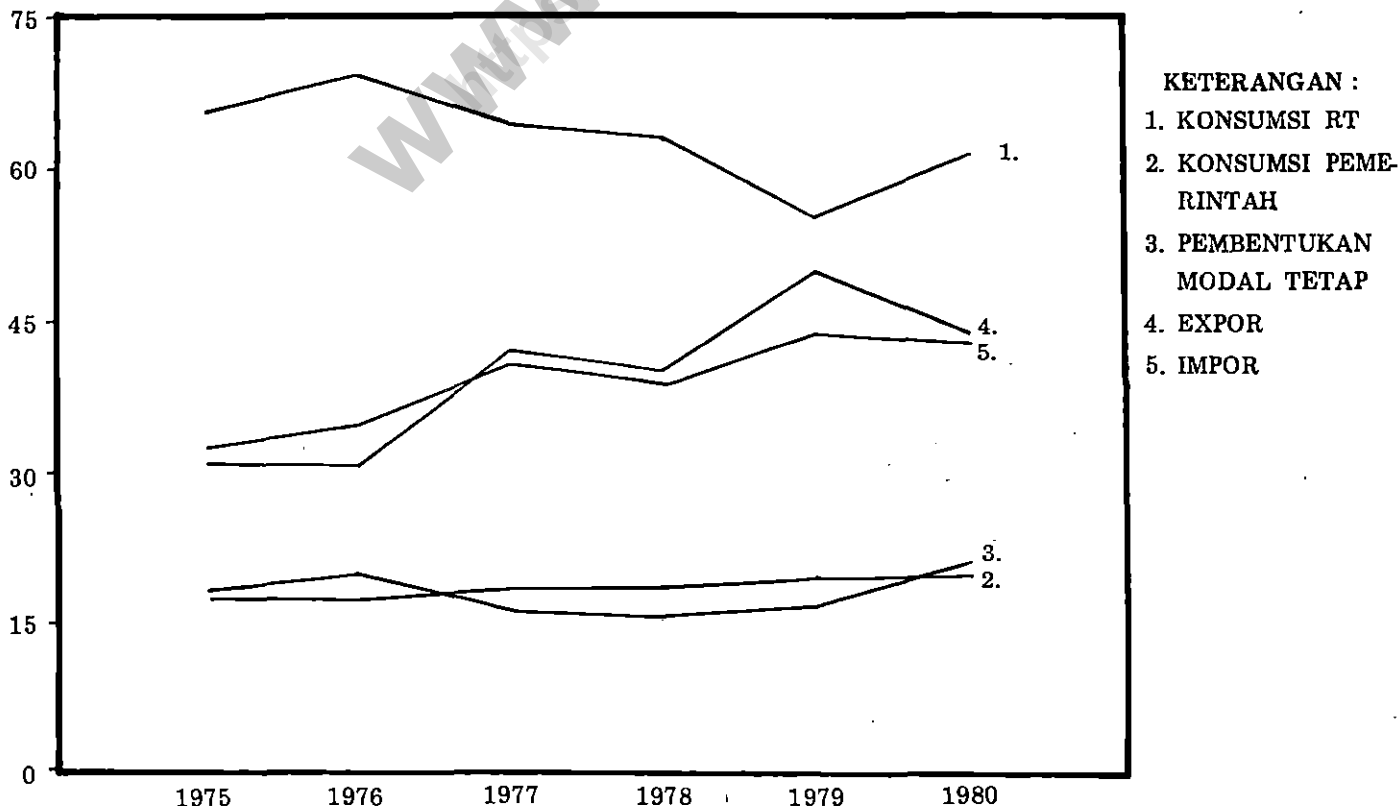
menurut penggunaan menunjukkan adanya perubahan-perubahan yang semula memiliki bobot/ penyerapan tinggi semakin menurun dan sebaliknya. Penggeseran-penggeseran pola tersebut diharapkan akan semakin memantapkan laju pembangunan di masa mendatang.

Penggunaan PDRB atas dasar harga berlaku untuk konsumsi rumah tangga bobotnya di atas 60%, tetap bertahan kecuali untuk tahun 1979, hanya 57,85%. Tahun 1975 berbobot 65,51%, tahun 1980 menjadi 60,72%. Sebaliknya konsumsi pemerintah kian naik, dari 17,87% untuk 1975 menjadi 19,61% pada tahun 1980. Demikian pula penggunaan untuk pembentukan modal mempunyai kenaikan yang cukup berarti. Persentase pembentukan modal tahun 1975 17,99% pada tahun 1980 menjadi 20,03%.

Apabila diperhatikan PDRB atas dasar harga konstan konsumsi Pemerintah naik dari 17,87% untuk 1975, menjadi 20,35% untuk tahun 1980, sedang untuk pembentukan modal dari tahun 1975 — 1980 17,99% menjadi 21,42%.

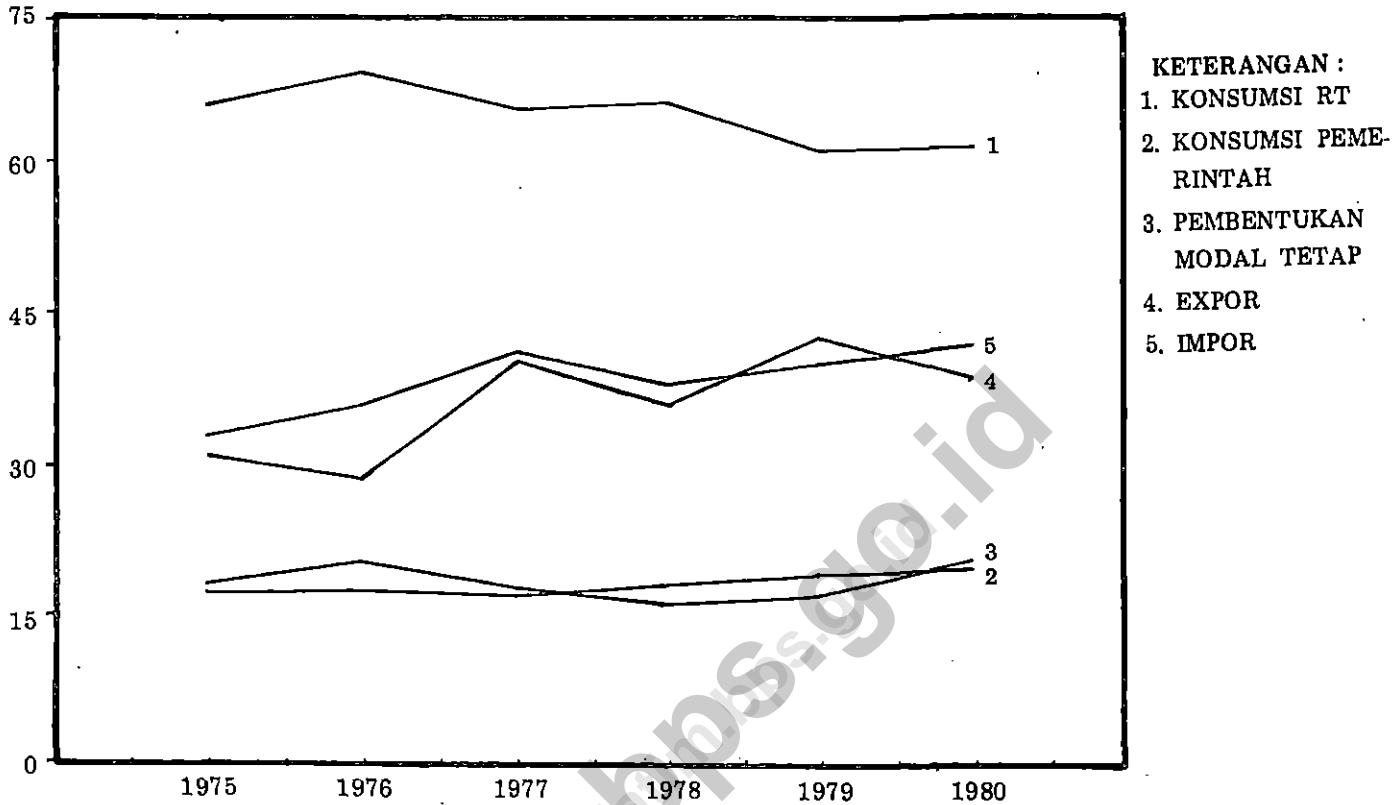
Barang-barang yang ke luar masuk wilayah Jawa Timur juga menunjukkan peningkatan. Arus barang yang ke luar wilayah Jawa Timur yang semula hanya 31,23% dari total PDRB pada tahun 1975 berubah menjadi 43,78% pada tahun 1980 dan bahkan pernah mencapai 50,65% untuk tahun 1979. Demikian pula nilai barang yang masuk Jawa Timur meningkat dengan pesat. Kalau pada tahun 1975 arus yang masuk hanya 32,60% maka tahun 1980 menjadi 44,14%.

GRAFIK 14 : DISTRIBUSI P. D. R. B. MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN 1975 — 1980 MENURUT HARGA BERLAKU





**GRAFIK 15 : DISTRIBUSI P. D. R. B. MENURUT KOMPONEN PENGUNTAAN 1975 - 1980 MENURUT HARGA KONSTAN 1975**



**KETERANGAN :**  
 1. KONSUMSI RT  
 2. KONSUMSI PEMERINTAH  
 3. PEMBENTUKAN MODAL TETAP  
 4. EXPOR  
 5. IMPOR

Tabel di bawah ini membandingkan perkembangan distribusi 2 komponen penting (konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap) antara PDRB Jatim dan PDB Indonesia tahun 1975 - 1980. Konsumsi Rumah Tangga Jawa Timur atas perhitungan harga berlaku dan harga konstan menurun dari awal ke akhir periode untuk harga konstan peranan konsumsi rumah tangga makin membesar.

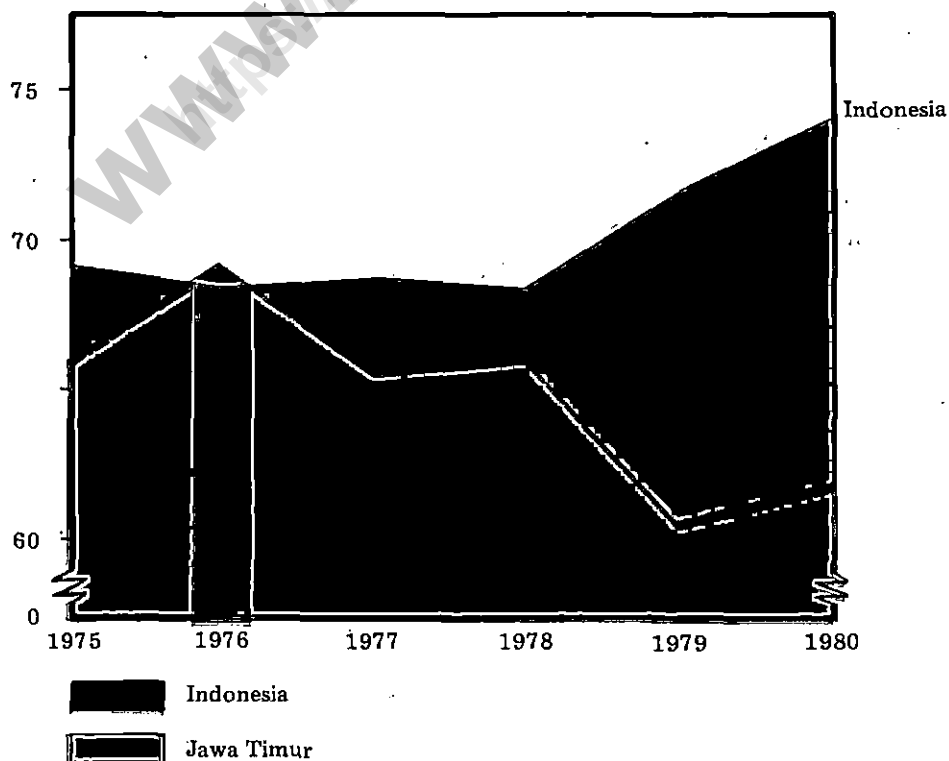
**Tabel 15 : Bobot Konsumsi Rumah Tangga Jatim dan Indonesia, Menurut Harga Berlaku dan Konstan '75 Tahun 1975 - 1980 (%).**

	Harga Berlaku		Harga Konstan '75	
	Jatim	Indonesia	Jatim	Indonesia
1	2	3	4	5
1975	65,51	69,17	65,51	69,17
76	68,15	67,65	68,98	68,73
77	64,64	65,63	65,15	67,40
78	64,49	66,76	65,61	66,84
79	57,85	60,93	61,08	71,92
80	60,72	60,46	61,27	74,28

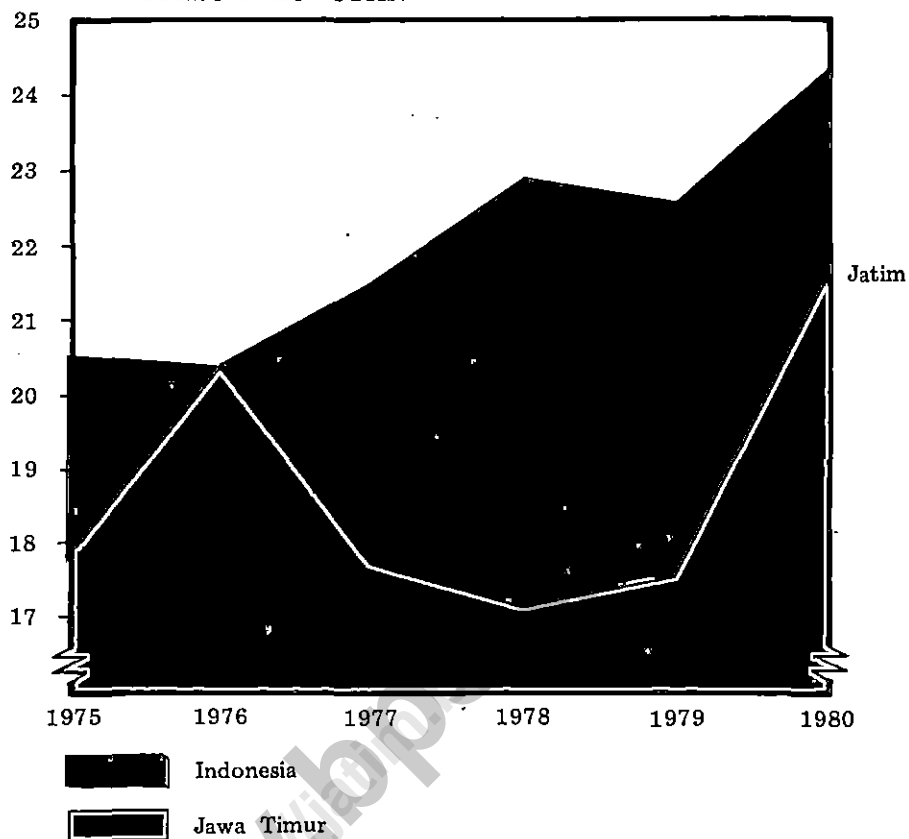
**Tabel 16 : Bobot Pembentukan Modal Tetap  
Jawa Timur dan Indonesia Menurut Harga Berlaku  
dan Harga Konstan '75 Tahun 1975 - 1980 (%).**

1	Harga Berlaku		Harga Konstan '75	
	Jatim	Indonesia	Jatim	Indonesia
2	3	4	5	
1975	17,99	20,34	17,99	20,34
76	19,10	20,72	20,31	20,17
77	16,25	20,13	17,80	21,50
78	15,97	20,53	17,09	22,94
79	17,10	20,93	17,64	22,54
80	20,03	20,87	21,42	24,39

**GRAFIK 16 : PERKEMBANGAN PROSENTASE KONSUMSI RUMAH  
TANGGA P.D.R.B. JAWA TIMUR 1975 - 1980 MENURUT  
HARGA KONSTAN**



GRAFIK 17 : PERKEMBANGAN PROSENTASE PEMBENTUKAN MODAL P.D.R.B. JAWA TIMUR 1975 - 1980 MENURUT HARGA KONSTAN



### 5.3. Indeks Harga Implisit Penggunaan PDRB.

Seperti uraian pada bab sebelumnya PDRB Jatim 1975 - 1980 perlu juga disajikan dalam bentuk indeks harga implisit. Harga implisit merupakan hasil perolehan nilai tambah atas dasar harga berlaku dibagi nilai tambah atas dasar harga konstan untuk suatu tahun tertentu. Dari hasil yang didapatkan, kita dapat mengetahui perubahan-perubahan harga berbagai jenis komoditi pada semua sektor yang terjadi sejak tahun dasar ( di sini tahun 1975 ). Dengan membandingkan dua angka indeks implisit 2 tahun berurutan akan terbaca berapa persenkah laju inflasi untuk tahun tertentu. Pengertian inflasi pada uraian ini dapat pula dicari untuk masing-masing komponen penggunaan PDRB Jawa Timur. Inflasi sesuai dengan keperluan analisa dapat dicari tahun demi tahun atau sekaligus untuk suatu kurun waktu tertentu.

Dari tabel indeks implisit PDRB menurut penggunaan menunjukkan ternyata komponen penggunaan barang-barang ekspor/ke luar wilayah mempunyai tingkat perubahan yang paling tinggi untuk periode 1975 - 1980. Indeks implisit komponen ini untuk tahun 1980 234,23. Khusus untuk barang ekspor ke luar negeri naik cukup tinggi akibat ke luarnya Knop 15 - 1978 dalam rangka merangsang produsen dalam negeri. Komponen ini memang mengalami perubahan yang besar sejak tahun 1976 hingga saat ini. Komponen impor termasuk barang-barang yang masuk dari propinsi lain juga memper-

lihatkan kepesatannya, namun demikian masih lebih rendah dibanding lajunya harga-harga barang-barang ekspor/ke luar wilayah Jatim.

Perkembangan harga untuk barang-barang konsumsi baik konsumsi rumah tangga atau konsumsi Pemerintah untuk tahun 1980 masing-masing 209,80 dan 203,94 dengan tahun dasar 1975. Khusus untuk konsumsi Pemerintah sejak tahun 1976 s/d 1979 selalu berada di atas indeks komponen konsumsi rumah tangga. Indeks untuk komponen pembentukan modal tetap bruto mempunyai gerak harga paling rendah, berarti gejolak harga lebih mudah dikendalikan dibanding komponen-komponen lainnya.

Sebagai salah satu indikator untuk memperoleh laju inflasi di Jawa Timur, perubahan-perubahan indeks implisit setiap tahun merupakan besarnya laju inflasi. Rata-rata tahunan inflasi di Jawa Timur periode 1975 — 1980 adalah 16,42%. Inflasi untuk tahun 1976, 1979 dan 1980 di atas 10%, masing-masing 15,07%, 26,60% dan 23,30%. Sedangkan untuk tahun 1977 dan 1978 masing-masing 9,72% dan 7,41%.

Pengamatan besarnya rata-rata tahunan laju inflasi antara komponen dalam penggunaan PDRB Jatim periode 1975 — 1980 komponen yang memiliki perubahan-perubahan harga terbesar (inflasi tertinggi) hingga terendah yaitu :

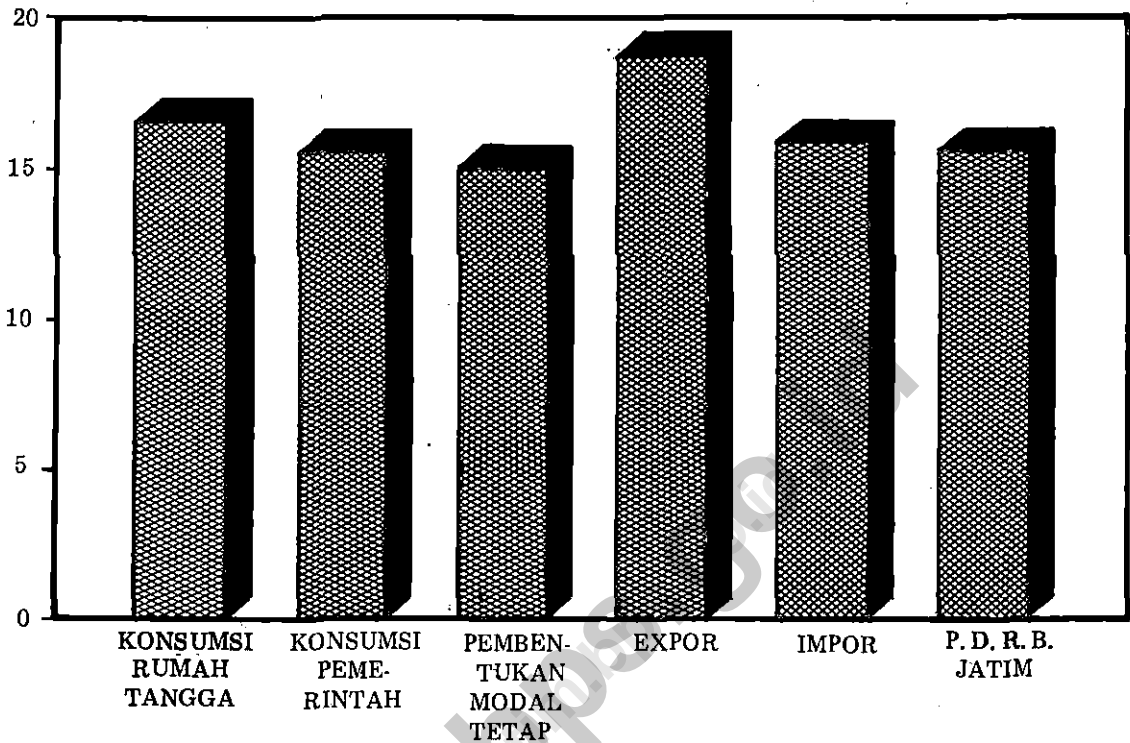
—	Komponen barang-barang ekspor	18,90 %
—	„ barang-barang import	17,33 %
—	„ konsumsi rumah tangga	16,28 %
—	„ konsumsi Pemerintah	15,52 % dan
—	„ pembentukan modal	15,00 %

Ekspor = ke luar negeri + ke luar propinsi di luar Jatim, impor = masuk dari luar negeri + masuk dari luar propinsi di luar Jatim.

Kalau pada tahun 1976 inflasi Jawa Timur sebesar 15,07 % maka komponen konsumsi Pemerintah dan ekspor di atas rata-rata, di atas 15,07%, sedang komponen lainnya di bawahnya.

Selanjutnya inflasi 1977 9,72% maka konsumsi rumah tangga, komponen penggunaan untuk barang-barang ekspor/ke luar wilayah dan barang-barang impor/masuk wilayah masing-masing 10,42%, 11,87%, dan 13,14% jauh di atas rata-rata tahun tersebut.

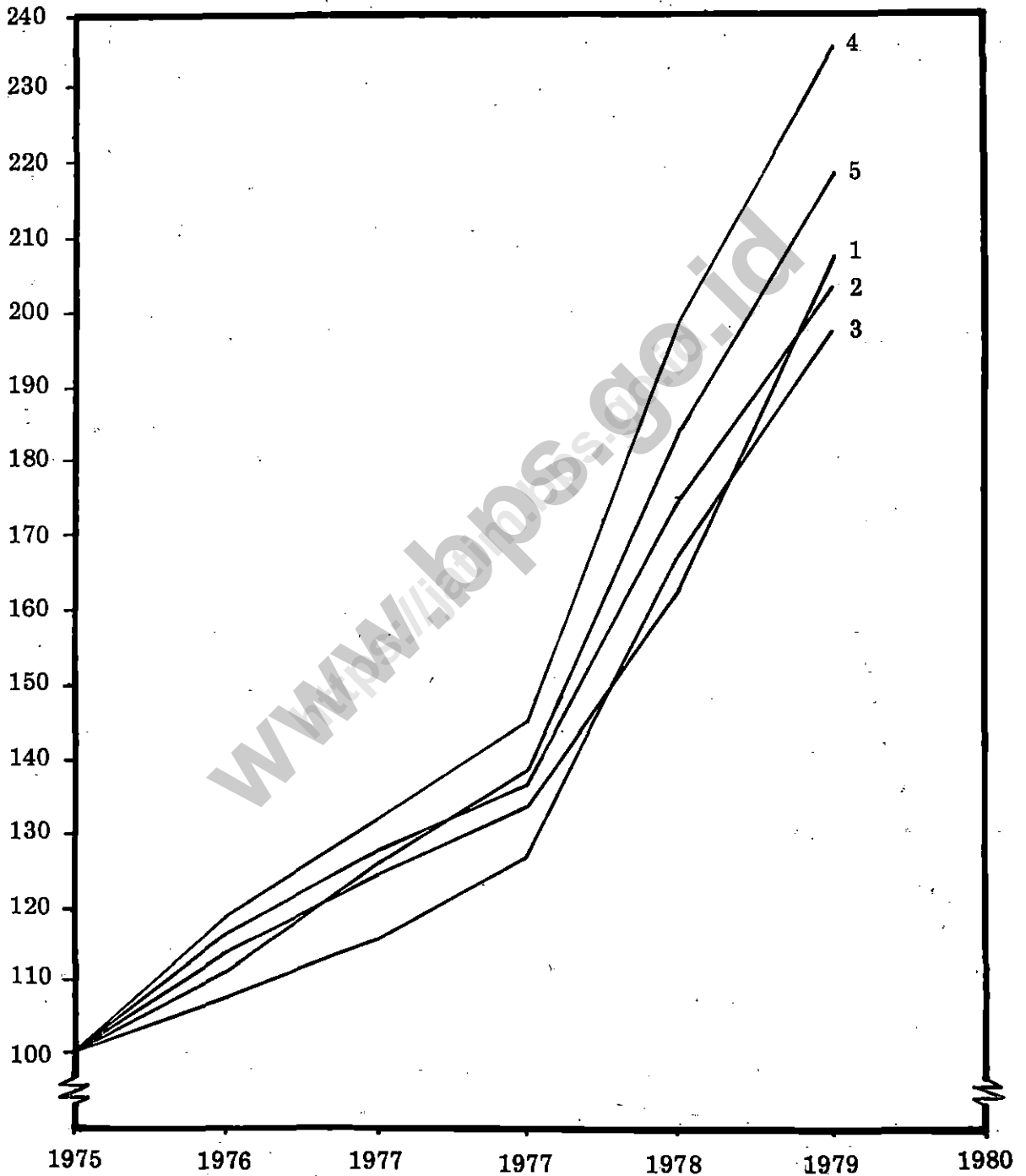
GRAFIK 17 : RATA - RATA INFLASI MENURUT KOMPONEN P. D. R. B. JAWA TIMUR 1975 - 1980. (%)



Adapun untuk tahun 1978 dan 1979, kecuali penggunaan konsumsi rumah tangga dan konsumsi Pemerintah semuanya di atas rata-rata inflasi tahun tersebut. Perlu diketahui rupa-rupanya tahun 1979 semua komponen mempunyai inflasi yang relatif tinggi, masing-masing untuk konsumsi rumah tangga 21,98%, konsumsi Pemerintah 26,67% ; pembentukan modal 31,39% ; ekspor/ke luar wilayah 36,30% dan impor/masuk wilayah inflasinya 34,24%. Dan rata-rata tahun 1979 sebesar 26,60% yang merupakan inflasi tertinggi dalam periode 1975 - 1980.

Tahun 1980 yang mempunyai inflasi 23,30% di Jawa Timur, ternyata sebagian besar disebabkan inflasi barang-barang keperluan konsumsi rumah tangga yaitu 29,02%. Bobot komponen ini pada tahun 1979 relatif masih terbesar dibanding komponen lainnya.

**GRAFIK 18 : PERKEMBANGAN INDEKS IMPLISIT P.D.R.B JAWA TIMUR  
MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN 1975 - 1980  
( 1975 = 100 )**



**KETERANGAN :**

1. KONSUMSI RT	3. PEMBENTUKAN MODAL TETAP
2. KONSUMSI PEMERINTAH	4. EXPOR
	5. IMPOR

#### 5.4. Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB menurut penggunaan.

Perkembangan dan pertumbuhan PDRB secara total telah dijelaskan pada bab IV yang mengulas tentang sektoral. Pada bab ini akan disinggung perkembangan dan pertumbuhan menurut komponen penggunaan PDRB.

Perkembangan PDRB menurut harga berlaku menunjukkan perkembangan yang lebih dari 3 kali lipat keadaan 1975 pada tahun 1980. Komponen barang-barang ekspor dan impor ternyata paling besar perubahannya masing-masing hampir 4,5 kali lipat keadaan 1975. Sedang konsumsi Pemerintah dan komponen pembentukan modal naik menjadi 3,5 kalinya.

Untuk komponen konsumsi rumah tangga memiliki perkembangan yang paling rendah yaitu 3 kalinya keadaan 1975. Dari sini tampak bahwa konsumsi rumah tangga kalah cepat perkembangannya, mungkin pola berpikir masyarakat sudah tidak berpangkal pada kebutuhan konsumsinya saja, melainkan sudah memikirkan hal-hal yang positif untuk masa depannya. Konsumsi Pemerintah cukup besar perkembangannya, diduga Pemerintah masih memiliki andil yang besar dalam investasi untuk persiapan program-program pelita-pelita yang akan datang. Ekspor cukup pesat tidak saja dirangsang dengan harga yang menarik oleh Pemerintah tetapi secara kuantum volume ekspor membesar. Perhatikan indeks perkembangan ekspor atas dasar harga konstan tahun 1980 195,68% atau hampir 2 kali lipat volume ekspor tahun 1975. Hal yang serupa untuk komponen impor.

Perkembangan umum PDRB tahun 1975 — 1980 telah membesarkan hati masyarakat Jawa Timur, karena perkembangan riilnya relatif tinggi atau naik 50% dibanding produksi tahun 1975.

Untuk uraian pertumbuhan lebih tepat dilihat PDRB menurut penggunaannya atas dasar harga konstan 1975. Perubahan/pertumbuhan riil untuk masing-masing komponen penggunaan PDRB Jawa Timur menurut hasil penghitungan ternyata rata-rata pertumbuhan riilnya terbesar pada :

— Komponen ekspor	15,24%
— „ impor	14,64%
— „ pembentukan modal	13,09%
— „ konsumsi Pemerintah	11,49% dan
— „ konsumsi rumah tangga	7,11%

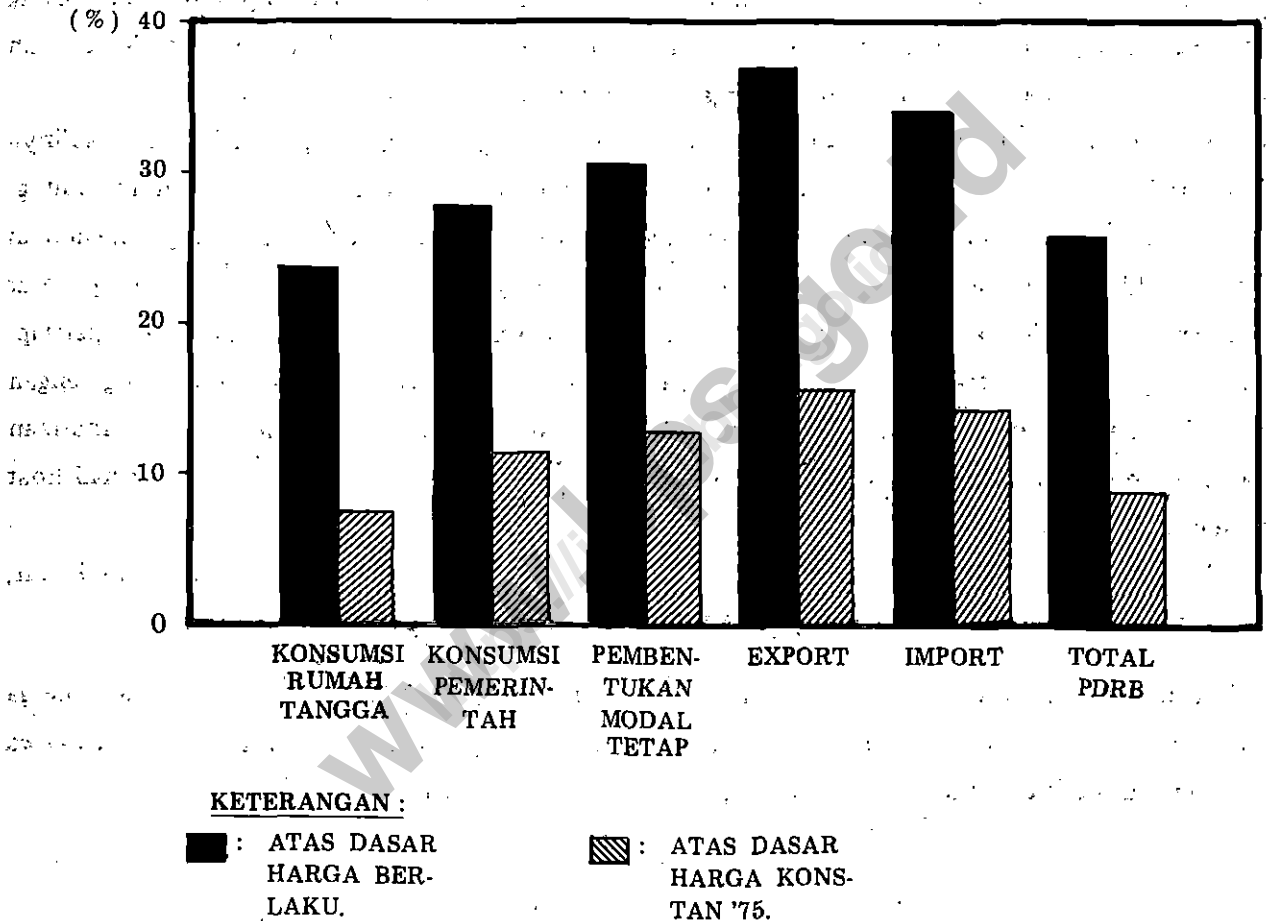
Dari angka di atas mencerminkan betapa pesatnya pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur.

Khususnya kalau kita memperhatikan pertumbuhan pembentukan modal dan perdagangan antar negara/propinsi, dan lebih rendahnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Konsumsi Pemerintah rata-rata kenaikannya masih tinggi, karena adanya penambahan pegawai dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dibawah ini batang diagram perbandingan rata-rata pertahun kenaikan atau pertumbuhan komponen penggunaan PDRB Jawa Timur sejak 1975 - 1980.

**GRAFIK 19 : RATA - RATA KENAIKAN PER TH P. D. R. B. MENU-  
RUT PENGGUNAAN UNTUK SETIAP KOMPONEN ME-  
NURUT HARGA BERLAKU DAN HARGA KONSTAN  
TAHUN 1975 - 1980**



Baik menurut harga berlaku maupun harga konstan 5 komponen tersebut memperlihatkan kenaikan-kenaikan. Rata-rata kenaikan atas harga berlaku diikuti pula kenaikan atas dasar harga konstan. Berarti kenaikan tersebut juga disertai dengan pertumbuhan riil atau kuantitas fisiknya yang mampu menggambarkan perkembangan/kemajuan secara nyata.



**BAB VI**  
**LAMPIRAN TABEL - TABEL**

www.bps.go.id

<https://intimbps.go.id>  
[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

**6.1. TABEL - TABEL POKOK PDRB  
SEKTORAL**

www.bps.go.id

<https://intimbps.go.id>  
[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

TABEL 6.1.1 : P.D.R.B. PROPINSI JAWA TIMUR ATAS DASAR HARGA BERLAKU (JUTA RP).

NOMOR	LAPANGAN USAHA	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	841.331,32	989.719,24	1.159.337,86	1.347.755,05	1.770.349,87	2.357.740,91	2.725.515,76
1.1.	Tanaman Bahan Makanan	658.969,87	752.845,94	843.745,49	957.634,68	1.293.999,20	1.718.932,39	1.949.952,99
1.2.	Tanaman Perkebunan Rakyat	54.233,09	62.536,15	69.115,33	74.894,93	87.727,13	99.722,62	110.644,41
1.3.	Tanaman Perkebunan Besar	56.405,18	82.201,59	131.431,10	172.422,25	211.037,78	295.494,42	364.547,60
1.4.	Peternakan & Hasil - hasilnya	50.275,65	69.463,25	81.903,70	103.117,26	118.042,06	164.753,32	205.675,26
1.5.	K e h u t a n a n	7.109,87	6.269,82	9.781,30	10.156,24	13.165,47	21.414,71	20.303,62
1.6.	P e r i k a n a n	14.337,66	16.402,49	23.360,94	29.529,67	46.378,23	57.423,45	74.391,88
2.	Pertambangan dan penggalian	3.729,88	9.551,30	10.094,51	8.640,97	11.650,35	15.676,59	18.800,14
3.	Industri Pengolahan	221.140,77	267.969,24	336.343,69	426.834,47	611.836,17	920.308,06	1.142.207,80
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	8.434,85	10.986,59	13.172,88	16.707,37	18.027,74	27.698,12	39.165,78
5.	B a n g u n a n	13.450,62	19.728,58	22.243,62	24.237,34	35.688,20	53.050,77	63.630,69
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	353.124,19	439.820,38	521.059,61	638.674,13	918.615,10	1.300.719,68	1.556.839,87
7.	Pengangkutan & Komunikasi	90.748,46	116.224,52	127.945,62	145.508,68	193.423,67	252.928,88	320.699,37
8.	Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	25.060,28	36.489,49	42.961,33	43.980,08	56.481,01	82.885,37	97.086,26
9.	Sewa Rumah	43.870,61	51.521,41	58.200,82	65.241,98	80.026,10	104.601,77	132.140,79
10.	P e m e r i n t a h a n	209.080,94	245.077,01	313.048,64	374.715,69	457.688,22	639.111,73	774.692,85
11.	J a s a - J a s a	43.432,84	56.043,47	61.828,93	67.484,52	87.375,60	118.885,23	144.729,41
	Produk Domestik Regional Bruto	1.853.404,76	2.243.131,23	2.666.237,51	3.159.780,28	4.241.162,03	5.873.607,11	7.015.508,72

TABEL 6.1.2 : P.D.R.B. PROPINSI JAWA TIMUR ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1975 (JUTA RP).

NOMOR	LAPANGAN USAHA	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	841.331,32	872.416,72	923.348,65	998.604,02	1.052.332,38	1.137.569,96	1.178.147,52
1.1.	Tanaman Bahan Makanan	658.969,87	683.679,84	727.430,46	786.735,21	839.038,82	908.924,85	918.865,94
1.2.	Tanaman Perkebunan Rakyat	54.233,09	52.436,40	55.200,44	55.185,03	57.326,92	60.929,94	67.617,92
1.3.	Tanaman Perkebunan Besar	56.405,18	57.513,03	58.793,89	69.793,89	70.576,39	77.104,05	96.205,90
1.4.	Peternakan & Hasil - hasilnya	50.275,65	56.200,56	57.254,48	63.386,27	59.383,52	63.596,14	66.795,03
1.5.	K e h u t a n a n	7.109,87	6.829,02	7.037,46	5.897,49	6.548,74	6.748,62	6.505,66
1.6.	P e r i k a n a n	14.337,66	15.757,87	17.631,92	17.606,13	19.457,99	20.266,36	22.157,07
2.	Pertambangan dan penggalian	3.729,88	9.211,92	9.292,40	6.881,55	6.774,27	7.032,89	8.218,64
3.	Industri Pengolahan	221.140,77	227.439,52	256.369,20	293.251,25	318.538,97	397.039,70	486.036,13
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	8.434,85	8.959,71	9.786,16	11.811,96	13.571,78	15.011,51	18.288,42
5.	B a n g u n a n	13.450,62	19.019,17	20.306,39	20.352,12	22.874,12	27.975,93	32.799,32
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	353.124,19	383.971,39	410.586,53	460.886,95	500.408,05	575.982,06	642.442,80
7.	Pengangkutan & Komunikasi	90.748,46	96.997,90	102.833,76	113.743,00	120.547,13	127.681,29	136.235,93
8.	Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	25.060,28	26.888,53	28.991,52	33.051,04	33.796,04	36.300,97	39.211,13
9.	Sewa Rumah	43.870,61	47.423,98	51.279,92	55.459,15	59.994,81	64.911,71	70.251,55
10.	P e m e r i n t a h a n	209.080,94	210.474,94	249.659,97	283.768,03	287.240,01	326.393,81	335.553,71
11.	J a s a - J a s a	43.432,84	46.586,74	49.414,87	52.288,32	54.307,65	58.812,17	62.493,81
	Produk Domestik Regional Bruto	1.853.404,76	1.949.390,52	2.111.869,37	2.330.097,39	2.470.385,21	2.774.712,00	3.009.678,96

TABEL 6.1.3. : DISTRIBUSI PERSENTASE P.D.R.B. PROPINSI JAWA TIMUR  
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU

NOMOR	LAPANGAN USAHA	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	45,39	44,12	43,49	42,65	41,74	40,14	38,85
1.1.	Tanaman Bahan Makanan	35,56	33,56	31,65	30,31	30,51	29,27	27,79
1.2.	Tanaman Perkebunan Rakyat	2,93	2,79	2,59	2,37	2,07	1,70	1,58
1.3.	Tanaman Perkebunan Besar	3,04	3,66	4,93	5,46	4,98	5,03	5,20
1.4.	Peternakan & Hasil - hasilnya	2,71	3,10	3,07	3,26	2,78	2,80	2,93
1.5.	K e h u t a n a n	0,38	0,28	0,37	0,32	0,31	0,36	0,29
1.6.	P e r i k a n a n	0,77	0,73	0,88	0,93	1,09	0,98	1,06
2.	Pertambangan dan penggalian	0,20	0,42	0,38	0,27	0,28	0,27	0,27
3.	Industri Pengolahan	11,93	11,95	12,61	13,51	14,43	15,67	16,28
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	0,46	0,49	0,49	0,53	0,42	0,47	0,56
5.	B a n g u n a n	0,73	0,88	0,84	0,77	0,84	0,90	0,91
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	19,05	19,61	19,54	20,21	21,66	22,15	22,19
7.	Pengangkutan & Komunikasi	4,90	5,18	4,80	4,61	4,56	4,31	4,57
8.	Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	1,35	1,63	1,61	1,39	1,33	1,41	1,39
9.	Sewa Rumah	2,37	2,30	2,18	2,06	1,89	1,78	1,88
10.	P e m e r i n t a h a n	11,28	10,92	11,74	11,86	10,79	10,88	11,04
11.	J a s a -- J a s a	2,34	2,50	2,32	2,14	2,06	2,02	2,06
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**TABEL 6.1.4. : DISTRIBUSI PERSENTASE P.D.R.B. PROPINSI JAWA TIMUR  
ATAS DASAR HARGA KONSTAN**

NOMOR	LAPANGAN USAHA	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	45,39	44,75	43,72	42,86	42,60	41,00	39,15
1.1.	Tanaman Bahan Makanan	35,56	35,07	34,45	33,76	33,96	32,76	30,53
1.2.	Tanaman Perkebunan Rakyat	2,93	2,69	2,61	2,37	2,32	2,20	2,24
1.3.	Tanaman Perkebunan Besar	3,04	2,95	2,78	3,00	2,86	2,78	3,20
1.4.	Peternakan & Hasil - hasilnya	2,71	2,88	2,71	2,72	2,40	2,29	2,22
1.5.	K e h u t a n a n	0,38	0,35	0,33	0,25	0,27	0,24	0,22
1.6.	P e r i k a n a n	0,77	0,81	0,84	0,76	0,79	0,73	0,74
2.	Pertambangan dan penggalian	0,20	0,47	0,44	0,30	0,27	0,25	0,27
3.	Industri Pengolahan	11,93	11,67	12,14	12,58	12,89	14,31	16,15
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	0,46	0,46	0,47	0,51	0,55	0,54	0,61
5.	B a n g u n a n	0,73	0,98	0,96	0,87	0,92	1,01	1,09
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	19,05	19,70	19,44	19,78	20,26	20,76	21,34
7.	Pengangkutan & Komunikasi	4,90	4,97	4,87	4,88	4,88	4,60	4,53
8.	Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	1,35	1,38	1,37	1,42	1,37	1,31	1,30
9.	Sewa Rumah	2,37	2,43	2,43	2,38	2,43	2,34	2,33
10.	P e m e r i n t a h a n	11,28	10,80	11,82	12,18	11,63	11,76	11,15
11.	J a s a - J a s a	2,34	2,39	2,34	2,24	2,20	2,12	2,08
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



TABEL 6.1.5. : INDEKS PERKEMBANGAN P.D.R.B. PROPINSI JAWA TIMUR ATAS DASAR HARGA BERLAKU

NOMOR	LAPANGAN USAHA	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	100,00	117,64	137,80	160,19	210,42	280,24	323,95
1.1.	Tanaman Bahan Makanan	100,00	114,25	128,04	145,32	196,37	260,85	295,91
1.2.	Tanaman Perkebunan Rakyat	100,00	115,31	127,44	138,10	161,76	183,88	204,02
1.3.	Tanaman Perkebunan Besar	100,00	145,73	233,01	305,69	374,15	523,88	646,30
1.4.	Peternakan & Hasil - hasilnya	100,00	138,16	162,91	205,10	234,79	327,70	409,10
1.5.	K e h u t a n a n	100,00	88,18	137,57	142,85	185,17	301,20	285,57
1.6.	P e r i k a n a n	100,00	114,40	162,93	205,96	323,47	400,51	518,86
2.	Pertambangan dan penggalian	100,00	256,08	270,64	231,67	312,35	420,30	504,04
3.	Industri Pengolahan	100,00	121,18	152,09	193,01	276,67	416,16	516,51
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	100,00	130,25	156,17	198,08	213,73	328,38	464,33
5.	B a n g u n a n	100,00	146,67	165,37	180,19	265,33	394,41	473,07
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	100,00	124,55	147,56	180,86	260,14	368,35	440,88
7.	Pengangkutan & Komunikasi	100,00	128,07	140,99	160,34	213,14	278,71	353,39
8.	Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	100,00	145,61	171,43	175,50	225,38	330,74	387,41
9.	Sewa Rumah	100,00	117,44	132,66	148,71	182,41	238,43	301,21
10.	P e m e r i n t a h a n	100,00	117,22	149,73	179,22	218,90	305,68	370,52
11.	J a s a — J a s a	100,00	129,03	142,36	155,38	201,17	273,72	333,22
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	121,03	143,86	170,49	228,83	316,92	378,52

**TABEL 6.1.6. : INDEKS PERKEMBANGAN P.D.R.B. PROPINSI JAWA TIMUR  
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1975**

NOMOR	LAPANGAN USAHA	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	100,00	103,69	109,75	118,69	125,08	135,21	140,03
1.1.	Tanaman Bahan Makanan	100,00	103,75	110,39	119,39	127,33	137,93	139,44
1.2.	Tanaman Perkebunan Rakyat	100,00	96,69	101,78	101,76	105,70	112,35	124,68
1.3.	Tanaman Perkebunan Besar	100,00	101,96	104,23	123,74	125,12	136,70	170,56
1.4.	Peternakan & hasil - hasilnya	100,00	111,78	113,88	126,08	118,12	126,50	132,86
1.5.	K e h u t a n a n	100,00	96,05	98,98	82,95	92,11	94,92	91,50
1.6.	P e r i k a n a n	100,00	109,91	122,98	122,80	135,71	141,35	154,54
2.	Pertambangan dan Penggalan	100,00	246,98	249,13	184,50	181,62	188,56	220,35
3.	Industri Pengolahan	100,00	102,85	115,93	132,61	144,04	179,54	219,79
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	100,00	106,22	116,02	140,04	160,90	177,97	216,82
5.	B a n g u n a n	100,00	141,40	150,97	151,31	170,06	207,99	243,85
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	100,00	108,74	116,27	130,52	141,71	163,11	181,93
7.	Pengangkutan & Komunikasi	100,00	106,89	113,32	125,34	132,84	140,70	150,12
8.	Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	100,00	107,30	115,69	131,89	134,86	144,85	156,47
9.	Sewa Rumah	100,00	108,10	116,89	126,42	136,75	147,96	160,13
10.	P e m e r i n t a h a n	100,00	100,67	119,41	135,72	137,38	156,11	160,49
11.	J a s a - J a s a	100,00	107,26	113,77	120,39	125,04	135,41	143,89
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	105,18	113,95	125,72	133,29	149,71	162,39

TABEL 6.1.7. : PENDAPATAN REGIONAL DAN ANGKA – ANGKA PERKAPITA  
PROPINSI JAWA TIMUR ATAS DASAR HARGA BERLAKU

NO.	PERINCIAN	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	P.D.R.B Atas Dasar Harga Pasar ( Juta Rp )	1.853.404,76	2.243.131,23	2.666.237,51	3.159.780,28	4.241.162,03	5.873.607,11	7.015.508,72
2	Dikurangi Penyusutan Barang Modal ( Juta Rp )	73.181,43	91.297,76	110.046,04	131.751,13	177.191,63	251.193,96	300.550,99
3	P.D.R.N Atas Dasar Harga Pasar ( Juta Rp )	1.780.223,33	2.151.833,47	2.556.191,47	3.028.029,15	4.063.970,40	5.622.413,15	6.714.957,75
4	Dikurangi Pajak Tak Langsung Netto ( Juta Rp )	76.115,31	100.143,02	118.594,81	142.930,53	172.796,22	211.263,07	230.671,68
5	P.D.R.N Atas Dasar Biaya Faktor (Pend Regional) ( Juta Rp )	1.704.108,02	2.051.690,45	2.437.596,66	2.885.098,62	3.891.174,18	5.411.150,08	6.484.286,05
6	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun ( Jiwa )	26.973.872	27.376.226	27.784.585	28.199.032	28.619.664	29.046.569	29.479.842
7	Pendapatan Regional Per Kapita ( Rp )	63.176,25	74.944,24	87.731,98	102.311,97	135.961,56	186.292,23	219.956,61
8	P.D.R.B Per-Kapita ( Rp )	68.711,11	81.937,20	95.961,03	112.052,79	148.190,49	202.213,46	237.976,47
9	Indeks Berantai Pendapatan Regional Per-Kapita	—	118,63	117,06	116,62	132,89	137,02	118,07
10	Indeks Perkembangan Pendapatan Regional Per-Kapita 175 = 100	100,00	118,63	138,87	161,95	215,21	294,88	348,16

**TABEL 6.1.8. : PENDAPATAN REGIONAL DAN ANGKA – ANGKA PERKAPITA  
PROPINSI JAWA TIMUR ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1975**

NO.	PERINCIAN	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	P.D.R.B Atas Dasar Harga Pasar (Juta Rp)	1.853.404,76	1.949.390,52	2.111.869,37	2.330.097,39	2.470.385,21	2.774.712,00	3.009.678,96
2	Dikurangi Penyusutan Barang Modal (Juta Rp)	73.181,43	78.191,27	84.757,66	93.888,43	100.176,94	114.793,09	127.642,71
3	P.D.R.N Atas Dasar Harga Pasar (Juta Rp)	1.780.223,33	1.871.199,25	2.027.111,71	2.236.208,96	2.370.208,27	2.659.918,91	2.882.036,25
4	Dikurangi Pajak Tak Langsung Netto (Juta Rp)	76.115,31	80.058,08	86.733,40	95.692,17	101.454,10	113.952,23	123.603,65
5	P.D.R.N Atas Dasar Biaya Faktor (Pend Reg) (Juta Rp)	1.704.108,02	1.791.141,17	1.940.378,31	2.140.516,79	2.268.754,17	2.545.966,68	2.758.432,60
6	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	26.973.872	27.376.226	27.784.585	28.199.032	28.619.664	29.046.569	29.479.842
7	Pendapatan Regional Per – Kapita (Rp)	63.176,25	65.426,88	69.836,51	75.907,46	79.272,56	87.651,20	93.570,13
8	P.D.R.B. Per-Kapita (Rp)	68.711,11	71.207,42	76.008,67	82.630,40	86.317,76	95.526,33	102.092,78
9	Indeks Berantai Pendapatan Regional Per-Kapita	—	103,56	106,74	108,69	104,43	110,57	106,75
10	Indeks Perkembangan Pendapatan Regional Per-Kapita 1975 = 100	100,00	103,56	110,54	120,15	125,48	138,74	148,11

TABEL 6.1.9. : INDEKS BERANTAI P.D.R.B. PROPINSI JAWA TIMUR ATAS DASAR HARGA BERLAKU  
( TAHUN SEBELUMNYA = 100 )

NOMOR	LAPANGAN USAHA	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	—	117,64	117,14	116,25	131,36	133,18	115,60
1.1.	Tanaman Bahan Makanan	—	114,25	112,07	113,50	135,12	132,84	113,44
1.2.	Tanaman Perkebunan Rakyat	—	115,31	110,52	108,36	117,13	113,67	110,95
1.3.	Tanaman Perkebunan Besar	—	145,73	159,89	131,19	122,40	140,02	123,37
1.4.	Peternakan & Hasil - hasilnya	—	138,16	117,91	125,90	114,47	139,57	124,84
1.5.	K e h u t a n a n	—	88,18	156,01	103,83	129,63	162,66	94,81
1.6.	P e r i k a n a n	—	114,40	142,42	126,41	157,06	123,82	129,55
2.	Pertambangan dan penggalian	—	256,08	105,69	85,60	134,83	134,56	119,92
3.	Industri Pengolahan	—	121,18	125,52	126,90	143,34	150,42	124,11
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	—	130,25	119,90	126,83	107,90	153,64	141,40
5.	B a n g u n a n	—	146,67	112,75	108,96	147,24	148,65	119,94
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	—	124,55	118,47	122,57	143,83	141,60	119,69
7.	Pengangkutan & Komunikasi	—	128,07	110,08	113,73	132,93	130,76	126,79
8.	Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	—	145,61	117,74	102,37	128,42	146,75	117,13
9.	Sewa Rumah	—	117,44	112,96	112,10	122,66	130,71	126,33
10.	P e m e r i n t a h a n	—	117,22	127,73	119,70	122,14	139,64	121,21
11.	J a s a — J a s a	—	129,03	110,32	109,15	129,48	136,06	121,74
	Produk Domestik Regional Bruto	—	121,03	118,86	118,51	134,22	138,49	119,44

TABEL 6.1.10. : INDEKS BERANTAI P.D.R.B. PROPINSI JAWA TIMUR

ATAS DASAR HARGA KONSTAN '75 (TAHUN SEBELUMNYA = 100)

NOMOR	LAPANGAN USAHA	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	—	103,69	105,84	108,15	105,38	108,10	103,57
2.	Tanaman Bahan Makanan	—	103,75	106,40	108,15	106,65	108,33	101,09
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat	—	96,69	105,27	99,97	103,88	106,29	110,98
4.	Tanaman Perkebunan Besar	—	101,96	102,23	118,71	101,12	109,25	124,77
1.4.	Peternakan, & Hasil - hasilnya	—	111,78	101,88	110,71	93,69	107,09	105,03
1.5.	K e h u t a n a n	—	96,05	103,05	83,80	111,04	103,05	96,40
1.6.	P e r i k a n a n	—	109,91	111,89	99,85	110,52	104,15	109,33
2.	Pertambangan dan penggalian	—	246,98	100,87	74,06	98,44	103,82	116,86
3.	Industri Pengolahan	—	102,85	112,72	114,39	108,62	124,64	122,41
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	—	106,22	109,22	120,70	114,90	110,61	121,83
5.	B a n g u n a n	—	141,40	106,77	100,23	112,39	122,30	117,24
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	—	108,74	106,93	112,25	108,58	115,10	111,54
7.	Pengangkutan & Komunikasi	—	106,89	106,02	110,61	105,98	105,92	106,70
8.	Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	—	107,30	107,82	114,00	102,25	107,41	108,02
9.	Sewa Rumah	—	108,10	108,13	108,15	108,18	108,20	108,23
10.	Pemerintahan	—	100,67	118,62	113,66	101,22	113,63	102,81
11.	J a s a - J a s a	—	107,26	106,07	105,81	103,86	108,29	106,26
	Produk Domestik Regional Bruto	—	105,18	108,33	110,33	106,02	112,32	108,47

TABEL 6.1.11. : INDEKS IMPLISIT P.D.R.B. PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR	LAPANGAN USAHA	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	100,00	113,45	125,56	134,96	168,23	207,26	231,34
1.1.	Tanaman Bahan Makanan	100,00	110,12	115,99	121,72	154,22	189,12	212,21
1.2.	Tanaman Perkebunan Rakyat	100,00	119,26	125,21	135,72	153,03	163,67	163,63
1.3.	Tanaman Perkebunan Besar	100,00	142,93	223,55	247,04	299,02	333,24	378,92
1.4.	Peternakan & Hasil - hasilnya	100,00	123,60	143,05	161,68	198,78	259,06	307,92
1.5.	K e h u t a n a n	100,00	91,81	138,99	172,21	201,04	317,32	312,09
1.6.	P e r i k a n a n	100,00	104,09	132,49	167,72	238,35	283,34	335,75
2.	Pertambangan dan penggalian	100,00	103,68	108,63	125,57	171,98	222,90	228,75
3.	Industri Pengolahan	100,00	117,82	131,20	145,55	192,08	231,79	135,00
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	100,00	122,62	134,61	141,44	132,83	184,51	214,16
5.	B a n g u n a n	100,00	103,73	109,54	119,09	156,02	189,63	194,00
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	100,00	114,55	126,91	138,58	183,57	225,83	242,33
7.	Pengangkutan & Komunikasi	100,00	119,82	124,42	127,93	160,45	198,09	235,40
8.	Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	100,00	135,71	148,19	133,07	167,12	228,33	247,60
9.	Sewa Rumah	100,00	108,64	113,50	117,64	133,39	161,14	188,10
10.	P e m e r i n t a h a n	100,00	116,44	125,39	132,05	159,34	195,81	230,87
11.	J a s a - J a s a	100,00	120,30	125,12	129,06	160,89	202,14	231,59
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	115,07	126,25	135,61	171,68	211,68	233,10

<https://intimbps.go.id>  
[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)



**6.2. TABEL - TABEL MENURUT  
PENGUNAAN PDRB**

<https://intimbps.go.id/>  
[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

TABEL 6.2.1. : P.D.R.B. PROP JAWA TIMUR MENURUT PENGGUNAAN

ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN '75 (JUTA RP)

NO.	PERINCIAN	1975	1976	1977	1978	1979	1980
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ATAS DASAR HARGA BERLAKU						
1	KONSUMSI RUMAH TANGGA	1.214.141,80	1.528.817,16	1.723.508,95	2.037.757,56	2.453.589,50	3.566.466,59
2	KONSUMSI PEMERINTAH	331.219,90	391.212,63	481.811,06	596.330,06	804.277,58	1.151.490,66
3	PEMBENTUKAN MODAL TETAP	333.506,02	428.379,87	433.106,42	504.522,45	725.362,47	1.176.673,63
4	EXPOR	578.777,37	683.462,20	1.143.542,36	1.251.904,51	2.147.946,64	2.571.474,94
5	IMPOR	604.240,33	788.740,63	1.115.731,28	1.230.734,30	1.890.014,16	2.592.498,71
	TOTAL P.D.R.B.	1.853.404,76	2.243.131,23	2.666.237,51	3.159.780,28	4.241.162,03	5.873.607,11
II	ATAS DASAR HARGA KONSTAN '75						
1	KONSUMSI RUMAH TANGGA	1.214.141,80	1.344.588,56	1.375.762,66	1.528.731,68	1.508.932,96	1.699.961,23
2	KONSUMSI PEMERINTAH	331.219,90	334.943,55	375.077,94	434.045,63	462.143,80	564.620,95
3	PEMBENTUKAN MODAL TETAP	333.506,02	395.972,57	375.888,26	398.152,34	435.641,85	594.447,85
4	EXPOR	578.777,37	581.907,99	870.369,74	862.221,22	1.085.336,70	1.097.826,46
5	IMPOR	604.240,33	708.022,15	885.229,23	893.053,48	1.021.670,10	1.182.144,49
	TOTAL P.D.R.B.	1.853.404,76	1.949.390,52	2.111.869,37	2.330.097,39	2.470.385,21	2.774.712,00

**TABEL 6.2.2. : DISTRIBUSI PERSENTASE P.D.R.B. PROP JATIM MENURUT PENGGUNAAN  
ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1975**

NO.	PERINCIAN	1975	1976	1977	1978	1979	1980
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>ATAS DASAR HARGA BERLAKU</b>						
1	KONSUMSI RUMAH TANGGA	65,51	68,15	64,64	64,49	57,85	60,72
2	KONSUMSI PEMERINTAH	17,87	17,44	18,07	18,87	18,96	19,61
3	PEMBENTUKAN MODAL TETAP	17,99	19,10	16,25	15,97	17,10	20,03
4	EXPOR	31,23	30,47	42,89	39,62	50,65	43,78
5	IMPOR	32,60	35,16	41,85	38,95	44,56	44,14
	<b>TOTAL P.D.R.B.</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>II</b>	<b>ATAS DASAR HARGA KONSTAN '75</b>						
1	KONSUMSI RUMAH TANGGA	65,51	68,98	65,15	65,61	61,08	61,27
2	KONSUMSI PEMERINTAH	17,87	17,18	17,76	18,63	18,71	20,35
3	PEMBENTUKAN MODAL TETAP	17,99	20,31	17,80	17,09	17,64	21,42
4	EXPOR	31,23	29,85	41,21	37,00	43,93	39,56
5	IMPOR	32,60	36,32	41,92	38,33	41,36	42,60
	<b>TOTAL P.D.R.B.</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**TABEL 6.2.3 : INDEKS PERKEMBANGAN P.D.R.B. PROP JATIM MENURUT PENGGUNAAN  
ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN '75**

1975 = 100

NO.	PERINCIAN	1975	1976	1977	1978	1979	1980
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>ATAS DASAR HARGA BERLAKU</b>						
1	KONSUMSI RUMAH TANGGA	100,00	125,92	141,95	167,84	202,08	293,74
2	KONSUMSI PEMERINTAH	100,00	118,11	145,47	180,04	242,82	347,65
3	PEMBENTUKAN MODAL TETAP	100,00	128,45	129,86	151,28	217,50	352,82
4	EXPOR	100,00	118,09	197,58	216,30	371,12	444,29
5	IMPOR	100,00	130,53	184,65	203,68	312,79	429,05
	<b>TOTAL P.D.R.B.</b>	<b>100,00</b>	<b>121,03</b>	<b>143,86</b>	<b>170,49</b>	<b>228,83</b>	<b>316,91</b>
<b>II</b>	<b>ATAS DASAR HARGA KONSTAN '75</b>						
1	KONSUMSI RUMAH TANGGA	100,00	110,74	113,31	125,91	124,28	140,01
2	KONSUMSI PEMERINTAH	100,00	101,12	113,24	131,04	139,53	170,47
3	PEMBENTUKAN MODAL TETAP	100,00	118,73	112,71	119,38	130,62	178,24
4	EXPOR	100,00	100,54	150,38	148,97	187,52	189,68
5	IMPOR	100,00	117,18	146,50	147,80	169,08	195,64
	<b>TOTAL P.D.R.B.</b>	<b>100,00</b>	<b>105,18</b>	<b>113,95</b>	<b>125,72</b>	<b>133,29</b>	<b>149,71</b>

**TABEL 6.2.4. : INDEKS BERANTAI ATAS DASAR HARGA BERLAKU  
DAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1975**

NO.	PERINCIAN	1975	1976	1977	1978	1979	1980
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>ATAS DASAR HARGA BERLAKU</b>						
1	KONSUMSI RUMAH TANGGA	—	125,92	112,73	118,23	120,41	145,36
2	KONSUMSI PEMERINTAH	—	118,11	123,16	123,77	134,87	143,17
3	PEMBENTUKAN MODAL TETAP	—	128,45	101,10	116,49	143,77	162,22
4	EXPORT	—	118,09	167,32	109,48	171,57	119,72
5	IMPORT	—	130,53	141,46	110,31	153,57	137,17
	<b>TOTAL P.D.R.B.</b>	—	121,03	118,86	118,51	134,22	138,49
<b>II</b>	<b>ATAS DASAR HARGA KONSTAN '75</b>						
1	KONSUMSI RUMAH TANGGA	—	110,74	102,10	111,36	98,70	112,66
2	KONSUMSI PEMERINTAH	—	101,12	111,98	115,72	106,47	122,17
3	PEMBENTUKAN MODAL TETAP	—	118,73	94,93	105,92	109,42	136,45
4	EXPORT	—	100,54	149,57	99,06	125,88	101,15
5	IMPORT	—	117,18	125,03	100,88	114,40	115,71
	<b>TOTAL P.D.R.B.</b>	—	105,18	108,33	110,33	106,02	112,32

TABEL 6.2.5. : INDEKS IMPLISIT

NO.	PERINCIAN	1975	1976	1977	1978	1979	1980
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>INDEKS IMPLISIT</b>						
1	KONSUMSI RUMAH TANGGA	100,00	113,70	125,55	133,30	162,60	209,80
2	KONSUMSI PEMERINTAH	100,00	116,80	128,46	137,39	174,03	203,94
3	PEMBENTUKAN MODAL TETAP	100,00	108,18	115,22	126,72	166,50	197,94
4	EXPOR	100,00	117,45	131,39	145,20	197,91	234,94
5	IMPOR	100,00	111,40	126,04	137,81	184,99	219,30
	<b>TOTAL P.D.R.B.</b>	<b>100,00</b>	<b>115,07</b>	<b>126,25</b>	<b>135,61</b>	<b>171,68</b>	<b>211,68</b>

<https://intimbps.go.id/>  
[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)



## **6.3 TABEL-TABEL PERBANDINGAN ANTAR PROPINSI**

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

[www.bps.go.id](https://www.bps.go.id)



**TABEL 6.3.2. : PERBANDINGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
PROPINSI - PROPINSI DI INDONESIA ATAS DASAR HARGA  
KONSTAN 1975, TH. 1975 - 1980 ( JUTA Rp. ).**

NO.	PROPINSI	1975	1976	1977	1978	1979	1980
1	Daerah Istimewa Aceh *)	211.523,25	224.135,83	229.585,37	315.134,46	508.810,41	
2	Sumatra Utara	688.347,37	753.872,45	794.371,51	873.332,06	953.373,37	1.083.931,70
3	Sumatra Barat *)	159.548,12	-	-	-	-	-
4	Riau dengan Minyak Bumi	1.806.598,26	1.825.726,80	1.787.595,82	1.658.463,97	1.681.955,15	
5	Jambi dengan Minyak Bumi	86.448,64	91.570,07	105.571,26	109.677,78	128.552,83	
6	Sumatra Sel. dengan Minyak Bumi	532.837,72	566.291,18	598.327,10	644.223,92	702.189,36	
7	Beng kulu	31.713,99	36.337,73	41.341,74	47.041,68	51.871,11	
8	Lampung	232.056,62	248.576,24	271.742,63	303.282,72	323.595,64	
9	D K I Jakarta	1.036.914,70	1.152.759,80	1.260.078,40	1.344.144,00	1.526.948,20	
10	Jawa Barat	1.720.786,61	1.905.814,02	2.005.226,14	2.245.391,38	2.345.969,78	
11	Jawa Tengah	1.289.785,28	1.393.763,52	1.436.310,88	1.633.258,96	1.732.302,02	
12	Daerah Istimewa Yogyakarta	146.205,82	149.370,05	156.497,82	166.350,29	171.298,91	
13	Jawa Timur	1.853.404,76	1.949.390,52	2.111.869,37	2.330.097,39	2.470.385,21	2.774.712,00
14	Kalimantan Barat	167.491,42	183.407,00	197.174,80	211.803,53	230.205,66	262.323,74
15	Kalimantan Tengah	64.946,41	74.428,58	83.894,87	95.300,96	105.603,26	122.631,06
16	Kalimantan Selatan	131.438,39	146.534,22	150.592,26	167.826,16	202.980,35	
17	Kal. Tim. dengan Minyak Bumi	449.490,99	629.897,79	920.454,68	978.719,53	1.035.138,43	
18	Sulawesi Utara	149.458,67	142.674,19	210.260,38	187.887,43	204.090,23	241.590,28
19	Sulawesi Tengah	56.834,12	65.584,06	71.333,03	75.318,28	80.825,17	
20	Sulawesi Selatan	358.500,79	374.696,84	441.045,82	495.065,42	523.458,00	
21	Sulawesi Tenggara	50.866,27	56.137,57	60.623,45	62.828,29	64.625,80	
22	B a l i	153.022,12	170.346,92	183.773,83	200.159,62	217.998,41	
23	Nusa Tenggara Barat	100.634,50	109.226,80	117.047,90	128.870,70	131.762,60	
24	Nusa Tenggara Timur	93.487,21	98.606,89	106.074,51	113.372,25	128.138,36	
25	Maluku	102.535,58	119.835,92	132.208,28	126.551,33	150.314,48	
26	Irian Jaya dengan Pertambangan	212.485,50	247.530,95	269.768,01	319.099,92	269.629,57	
27	Timor Timur	-	-	-	-	-	

Keterangan : \*) Atas Dasar Harga Konstan 1973.



**TABEL 6.3.4. : INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
PROPINSI - PROPINSI DI INDONESIA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1975,  
TH 1975 - 1980 ( TH 1975 = 100.00 )**

NO	PROPINSI	ATAS DASAR HARGA KONSTAN					
		1975	1976	1977	1978	1979	1980
1	Daerah Istimewa Aceh *)	100,00	105,96	108,54	148,98	240,55	
2	Sumatra Utara	100,00	109,52	115,40	126,87	138,50	157,47
3	Sumatra Barat *)	118,88	-	-	-	-	
4	Riau dengan Minyak Bumi	100,00	101,06	98,95	91,80	93,10	
5	Jambi dengan Minyak Bumi	100,00	105,92	122,12	126,86	148,70	
6	Sum.Sel dengan Minyak Bumi	100,00	106,28	112,29	120,90	131,78	
7	Bengkulu	100,00	114,58	130,36	148,33	163,56	
8	Lampung	100,00	107,12	117,10	130,69	139,45	
9	D. K. I. Jakarta	100,00	111,17	121,52	129,63	147,26	
10	Jawa Barat	100,00	110,75	116,53	130,49	136,33	
11	Jawa Tengah	100,00	108,06	111,36	126,63	134,31	
12	Daerah Istimewa Yogyakarta	100,00	102,16	107,04	113,78	117,16	
13	Jawa Timur	100,00	105,18	113,95	125,72	133,29	149,71
14	Kalimantan Barat	100,00	109,50	117,72	126,46	137,44	156,62
15	Kalimantan Tengah	100,00	114,60	129,18	146,74	162,60	199,60
16	Kalimantan Selatan	100,00	111,49	114,57	127,68	154,43	
17	Kal.Tim dengan Minyak Bumi	100,00	140,14	204,78	217,74	230,29	
18	Sulawesi Utara	100,00	95,46	140,68	125,71	136,55	161,64
19	Sulawesi Tengah	100,00	115,40	125,51	132,52	142,21	
20	Sulawesi Selatan	100,00	104,52	123,03	138,09	146,01	
21	Sulawesi Tenggara	100,00	110,36	119,18	123,52	127,05	
22	B a l i	100,00	111,32	120,10	130,80	142,46	
23	Nusa Tenggara Barat	100,00	108,54	116,31	128,06	130,93	
24	Nusa Tenggara Timur	100,00	105,48	113,46	121,27	137,06	
25	M a l u k u	100,00	116,87	128,94	123,42	146,60	
26	Irian Jaya dengan Pertambangan	100,00	116,49	126,96	150,17	126,89	
27	Timor Timur	-	-	-	-	-	

Keterangan : \*) Atas Dasar Harga Konstan 1973.



**TABEL 6.3.6. : INDEKS BERANTAI DARI PRODUK DOMESTIK REGIONAL  
BRUTO PROPINSI - PROPINSI DI INDONESIA ATAS DASAR  
HARGA KONSTAN 1975; 1975 - 1980  
( TAHUN SEBELUMNYA = 100,00 )**

NO	PROPINSI	1975	1976	1977	1978	1979	1980
	( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )
1.	Daerah Istimewa Aceh *)	—	105,96	102,43	137,26	161,46	
2.	Sumatra Utara	—	109,52	105,37	109,94	109,18	113,69
3.	Sumatra Barat *)	—	—	—	—	—	—
4.	Riau dengan Minyak Bumi	—	101,06	97,91	92,78	101,42	
5.	Jambi dengan Minyak Bumi	—	105,92	115,29	103,88	117,22	
6.	Sumatra Selatan dengan Minyak B.	—	106,29	105,66	107,67	109,00	
7.	Bengkulu	—	114,58	113,77	113,78	110,27	
8.	Lampung	—	107,12	109,32	111,61	106,70	
9.	D.K.I. Jakarta	—	111,17	109,31	106,67	113,60	
10.	Jawa Barat	—	110,75	105,22	111,98	104,48	
11.	Jawa Tengah	—	108,06	103,05	113,71	106,06	
12.	Daerah Istimewa Yogyakarta	—	102,16	104,78	106,30	102,97	
13.	Jawa Timur	—	105,18	108,33	110,33	106,02	112,32
14.	Kalimantan Barat	—	109,50	107,51	107,42	108,69	113,95
15.	Kalimantan Tengah	—	114,60	112,72	113,60	110,81	122,75
16.	Kalimantan Selatan	—	111,49	102,76	111,44	120,95	
17.	Kalimantan Timur dg Minyak. Bm.	—	140,14	146,13	106,33	105,76	
18.	Sulawesi Utara	—	95,46	147,37	89,36	108,62	118,37
19.	Sulawesi Tengah	—	115,40	108,76	106,45	108,12	
20.	Sulawesi Selatan	—	104,52	117,71	112,25	105,74	
21.	Sulawesi Tenggara	—	110,36	107,99	103,64	102,86	
22.	B a l i	—	111,32	107,89	108,92	108,91	
23.	Nusa Tenggara Barat	—	108,54	107,16	110,10	102,24	
24.	Nusa Tenggara Timur	—	105,48	107,57	106,88	113,02	
25.	M a l u k u	—	116,87	110,33	95,72	118,78	
26.	Irian Jaya dengan Pertambangan	—	116,49	108,99	118,28	84,50	
27.	Timor Timur	—	—	—	—	—	

Keterangan : \*) Atas Dasar Harga Konstan 1973.





**TABEL 6.3.8. : PERBANDINGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL  
BRUTO PERKAPITA PROPINSI - PROPINSI DI INDONESIA  
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1975, TH 1975 - 1980  
(RUPIAH)**

NO	PROPINSI	ATAS DASAR HARGA KONSTAN					
		1975	1976	1977	1978	1979	1980
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Daerah Istimewa Aceh *)	97.029	98.738	98.113	130.761	205.165	
2.	Sumatra Utara	94.050	101.118	102.733	110.366	124.284	130.937
3.	Sumatra Barat *)	50.278	--	--	--	--	
4.	Riau dengan Minyak Bumi	980.700	966.676	919.750	826.932	810.618	
5.	Jambi dengan Minyak Bumi	76.415	76.215	86.838	85.254	95.747	
6.	Sum. Sel. dengan Minyak Bumi	137.121	139.779	144.209	150.279	158.510	
7.	Bengkulu	51.802	56.859	61.969	67.547	71.349	
8.	Lampung	71.898	72.317	73.909	80.577	82.753	
9.	D.K.I. Jakarta	195.892	207.603	216.754	223.886	244.719	
10.	Jawa Barat	71.072	76.865	78.970	86.340	88.070	
11.	Jawa Tengah	56.012	59.102	60.149	67.768	70.618	
12.	Daerah Istimewa Yogyakarta	56.330	56.845	58.876	61.778	62.718	
13.	Jawa Timur	68.711	71.207	76.009	82.630	86.318	95.526
14.	Kalimantan Barat	76.132	81.449	85.586	89.860	95.461	106.325
15.	Kalimantan Tengah	82.341	90.233	97.650	107.958	116.918	140.080
16.	Kalimantan Selatan	70.450	76.536	76.865	81.414	98.066	
17.	Kal. Tim dengan Minyak Bumi	514.817	681.022	934.847	954.744	972.657	
18.	Sulawesi Utara **)	80.075	73.434	106.837	95.115	102.055	119.330
19.	Sulawesi Tengah	56.235	61.088	64.361	66.076	69.051	
20.	Sulawesi Selatan	66.509	67.537	77.587	86.590	90.909	
21.	Sulawesi Tenggara	63.834	67.770	72.441	73.343	73.081	
22.	B a l i	68.011	74.438	78.955	84.549	90.536	
23.	Nusa Tenggara Barat	41.405	43.845	45.849	49.263	49.154	
24.	Nusa Tenggara Timur	38.713	40.106	42.596	44.032	48.784	
25.	Maluku	86.821	99.202	106.965	99.962	115.894	
26.	Irian Jaya dengan Pertambangan	205.795	234.118	249.171	287.830	237.507	
27.	Timor -- Timur						

Keterangan : \*) Atas Dasar Harga Konstan 1973.

\*\*) Atas Dasar Harga Konstan 1974.

**TABEL 6.3.9. : INDEKS IMPLISIT DARI PRODUK DOMESTIK  
REGIONAL BRUTO PROPINSI-PROPINSI DI INDONESIA**

NO	PROPINSI	1975	1976	1977	1978	1979	1980
		1	2	3	4	5	6
1	Daerah Istimewa Aceh *)	100,00	104,77	126,12	136,97	179,52	
2	Sumatra Utara	100,00	112,93	126,07	146,07	171,95	236,46
3	Sumatra Barat *)	118,02	—	—	—	—	—
4	Riau dengan Minyak Bumi	100,00	102,55	109,17	120,05	184,63	
5	Jambi dengan Minyak Bumi	100,00	118,49	139,24	156,26	203,02	
6	Sum. Sel dengan Minyak Bumi	100,00	113,76	128,32	140,89	221,81	
7	Bengkulu	100,00	121,28	134,97	145,92	182,62	
8	Lampung	100,00	126,99	147,58	153,00	194,02	
9	D.K.I. Jakarta	100,00	120,61	135,18	147,63	188,91	
10	Jawa Barat	100,00	111,61	120,31	133,34	160,69	
11	Jawa Tengah	100,00	116,85	134,57	149,19	177,96	
12	Daerah Istimewa Yogyakarta	100,00	117,58	129,08	145,87	168,68	
13	Jawa Timur	100,00	115,07	126,25	135,61	171,68	211,68
14	Kalimantan Barat	100,00	120,73	130,28	139,08	166,73	201,91
15	Kalimantan Tengah	100,00	118,59	133,74	157,48	221,34	246,65
16	Kalimantan Selatan	100,00	122,54	143,98	153,43	174,45	
17	Kal. Tim dengan Minyak Bumi	100,00	116,45	125,79	137,28	192,93	
18	Sulawesi Utara	100,00	120,80	131,37	147,57	187,71	
19	Sulawesi Tengah	100,00	122,46	145,86	182,33	213,16	
20	Sulawesi Selatan	100,00	114,34	123,33	134,60	175,57	
21	Sulawesi Tenggara	100,00	128,01	138,12	143,79	161,94	
22	B a l i	100,00	118,73	127,01	136,85	152,76	
23	Nusa Tenggara Barat	100,00	126,74	141,43	159,76	187,07	
24	Nusa Tenggara Timur	100,00	121,44	133,83	163,33	189,24	
25	Maluku	100,00	115,37	148,72	168,95	205,49	
26	Irian Jaya dengan Pertambangan	100,00	108,74	118,71	126,75	197,73	
27	Timor Timur	—	—	—	—	—	

Keterangan : \*) Atas Dasar Harga Konstan 1973.

TABEL 6.3.10. : RATA-RATA TINGKAT PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL  
BRUTO PROPINSI-PROPINSI DI INDONESIA ATAS DASAR HARGA  
KONSTAN 1975, 1975 - 1979 ( % )

NO.	PROPINSI	TINGKAT PERTUMBUHAN TAHUNAN ( % )				RATA-RATA TINGKAT PER- TUMBUHAN ( % )
		1976	1977	1978	1979	1976 - 1979
	( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )
1.	Daerah Istimewa Aceh *)	5,96	2,43	37,26	61,46	26,78
2.	Sumatra Utara	9,52	5,37	9,94	9,18	8,50
3.	Sumatra Barat *)	—	—	—	—	—
4.	Riau dengan Minyak Bumi	1,06	- 2,09	- 7,23	1,42	- 1,71
5.	Jambi dengan Minyak Bumi	5,92	15,29	3,88	17,22	10,58
6.	Sumatra Selatan dengan Minyak Bumi	6,29	5,66	7,67	9,00	7,16
7.	Bengkulu	14,58	13,77	13,78	10,27	13,10
8.	Lampung	7,12	9,32	11,61	6,70	8,69
9.	D.K.I. Jakarta	11,17	9,31	6,67	13,60	10,19
10.	Jawa Barat	10,75	5,22	11,98	4,48	8,11
11.	Jawa Tengah	8,06	3,05	13,71	6,06	7,72
12.	Daerah Istimewa Yogyakarta	2,16	4,78	6,30	2,97	4,05
13.	Jawa Timur	5,18	8,33	10,33	6,02	7,47
14.	Kalimantan Barat	9,50	7,51	7,42	8,69	8,28
15.	Kalimantan Tengah	14,60	12,72	13,60	10,81	12,93
16.	Kalimantan Selatan	11,49	2,76	11,44	20,95	11,66
17.	Kalimantan Timur dengan Minyak Bumi	40,14	46,13	6,33	5,76	24,59
18.	Sulawesi Utara **)	- 4,54	47,37	- 10,64	8,62	10,20
19.	Sulawesi Tengah	15,40	8,76	6,45	8,12	9,68
20.	Sulawesi Selatan	4,52	17,71	12,25	5,74	10,06
21.	Sulawesi Tenggara	10,36	7,99	3,64	2,86	6,21
22.	Bali	11,32	7,89	8,92	8,91	9,26
23.	Nusa Tenggara Barat	8,54	7,16	10,10	2,24	7,01
24.	Nusa Tenggara Timur	5,48	7,57	6,88	13,02	8,24
25.	Maluku	16,87	10,33	- 4,28	18,78	10,43
26.	Irian Jaya dengan Pertambangan	16,49	8,99	18,28	- 15,50	7,07
27.	Timor Timur	—	—	—	—	—

Keterangan : \*) Atas Dasar Harga Konstan 1973.

\*\*) Atas Dasar Harga Konstan 1974.